4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41	Penerimaan Perpajakan
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri
4111	Pendapatan Pajak penghasilan
41111	Pendapatan PPh Migas
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Penerimaan yang berasal dari PPh minyak bumi yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Minyak Bumi,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	SKPKB PPh Minyak Bumi dan,
	SKPKBT PPh Minyak Bumi.
411112	Pendapatan PPh Gas Alam
411112	·
	Kode MAP ini digunakan untuk menampung penerimaan ke kas negara yang berasal PPh gas alam yang terdiri dari :
	Setoran PPh Gas Alam,
	Surat Tagihan Pajak (STP),
	SKPKB PPh Gas Alam dan,
	SKPKBT PPh Gas Alam.
411113	Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
711113	
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi yang terdiri dari :
	Setoran PPh Lainnya dari Minyak Bumi,     Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi,
	SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan,
	SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.
	SKI KBI I I II Lummyu dan wimiyak barin.
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari :
	Setoran PPh Lainnya dari Gas Alam,
	Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam,
	SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam dan,
	- SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
14440	
41112	Pendapatan PPh Non-Migas
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	Masa/Angsuran Tahunan
	Surat Tagihan Pajak (STP)
	PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
	· SKPKB PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan,
	· SKPKBT PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang pesangon
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
	Penerimaan dari transaksi dalam negeri yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang
	telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa,
	PPh Penebusan Migas,
	PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri
	PPh yang dipungut Badan Pamungut Laippya
	PPh yang dipungut Badan Pemungut Lainnya,     Surat Tagihan Pajak (STP),
	- Surat raginal Pajak (STP),  - SKPKB,
	SKPKB, SKPKB PPh Penebusan Migas,
	SKPKB PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri,
	· SKPKBT,
	· SKPKBT PPh Penebusan Migas dan,
	- SKPKBT PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri,
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam
	UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:

	· Masa,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB,
	· SKPKBT
411124	Pendapatan PPh Pasal 23
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa,
	· Dividen,
	· Bunga,
	· Royalti,
	· Jasa,
	· PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
	Surat Tagihan Pajak (STP),
	· STP Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa,
	- SKPKB,
	· SKPKB Dividen, Bunga Royalti dan Jasa,
	SKPKB PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
	· SKPKBT,
	· SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti dan Jasa, dan
	· SKPKBT PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	Masa/Angsuran,
	· Tahunan,
	Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB dan,
	SKPKBT.
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa/Angsuran,
	· Tahunan,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB dan,
	· SKPKBT.
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa/Angsuran,
	· Dividen,
	- Bunga,
	- Royalti,
	- Jasa,
	Laba setelah pajak BUT  Surat Tagihan Brigk (STD)
	Surat Tagihan Pajak (STP),  STD Dividen Runga Payalti, Jaca dan Laba setelah pajak PUT.  STD Dividen Runga Payalti, Jaca dan Laba setelah pajak PUT.  STD Dividen Runga Payalti, Jaca dan Laba setelah pajak PUT.
	STP Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT,     SKPKB,
	SKPKB,     SKPKB Dividen, Bunga Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT,
	SKPKB Dividen, Bunga Royani, Jasa dan Laba selelah pajak bo 1,     SKPKBT dan,
	SKPKBT dari,     SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT.
411128	Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Fiskal Luar Negeri,
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan OP
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi

	DDh Einal Dacal 4 ayat (2) Punga Danasita/Tahungan dan SDI Orang Drihadi
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Orang Pribadi     PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Burse Efek Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualah Saham Milik Perusahaan Modal Ventura OP
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Orang Pribadi
	PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Badan
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Burse Efek Badan
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konsultasi Badan
	PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Badan
	PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Badan
	PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Badan
	PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Badan
	· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Badan
	PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Badan
	PPh Final Pasal 19 Revaluasi Aktiva Tetap Badan  PRI Sinah dan Badan
	PPh Final Lainnya
	Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final,      Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final,
	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi,  CKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Padaga
	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan,     SKPKB PPh Final Pasal 45 Organ Prihadi
	SKPKB PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi,  SKPKB PPh Final Pasal 15 Padan
	SKPKB PPh Final Pasal 15 Badan,     SKPKB PPh Final Pasal 19 Badan
	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi,
	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan,     SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan,
	SKPKBT PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi,
	SKPKBT PPh Final Pasal 15 Badan,
	SKPKBT PPh Final Pasal 19 Badan
	Sitt Not 11 int indir addi 17 baddii
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi, yang terdiri dari :
	Setoran PPh Lainnya dari Minyak Bumi,
	Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi,
	SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan,
	SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari :
	Setoran PPh Lainnya dari Gas Alam,
	Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam,
	SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam dan,
	SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
41121	Pendapatan PPN
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18
	tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Setoran Masa,
	· Setoran Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
	Setoran Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean,
	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri,
	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,

	CTD
	· STP,
	SKPKB Masa,
	SKPKB Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
	SKPKB Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
	· SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri,
	· SKPKB Pemungut PPN,
	· SKPKBT Masa,
	· SKPKBT Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
	· SKPKBT Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
	SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri,
	· SKPKBT Pemungut PPN,
	· PPN Final Membangun Sendiri,
	· Pemungut.
411212	Pendapatan PPN Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Setoran Masa,
	· STP.
	SKPKB PPN Impor,
	SKPKBT PPN Impor,
	Pemungut.
	, smangan
411219	Pendapatan PPN Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN dan PPn BM Lainnya yang belum tertampung dalam pembagian
	jenis penerimaan PPN/PPnBM.
41122	Pendapatan PPnBM
411221	Pendapatan PPnBM dalam Negeri
711221	
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	Setoran Masa/Angsuran,
	· STP,
	SKPKB Masa,
	SKPKB Pemungut PPn BM,  SKPKPT M.
	- SKPKBT Masa,
	SKPKBT Pemungut PPnBM,
	Pemungut.
411222	Pendapatan PPnBM Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Setoran Masa,
	· STP,
	· SKPKB PPn BM Impor,
	· SKPKBT PPn BM Impor,
	· Pemungut.
444000	
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN dan PPn BM Lainnya yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN/PPnBM.
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411311	Pendapatan PBB Pedesaan
411311	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pedesaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
111010	Dondonaton DDD Dorketoon
411312	Pendapatan PBB Perkotaan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkotaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
	190. 12 Taliuli 1703.
411313	Pendapatan PBB Perkebunan
411313	Leuraharan Epp Leurahanan

	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411314	Pendapatan PBB Kehutanan Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor kehutanan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU
411015	No. 12 Tahun 1983.
411315	Pendapatan PBB Pertambangan  Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pertambangan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411319	Pendapatan PBB Lainnya  Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB lainnya yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PBB yang diatas.
4114	Pendapatan BPHTB
41141	Pendapatan BPHTB
411411	Pendapatan BPHTB
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran BPHTB yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 1997 UU No. 20 tahun 2000.
4115	Pendapatan Cukai
41151	Pendapatan Cukai Lagil Tembakau
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau  Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya (pasal 4 ayat (1) c UU No. 11 tahun 1995)
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	Ethyl Alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi dengan tidak mengindahkan bahan yang dig
411510	Described to Color Missesses as a second of Ethel Allich of
411513	Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol  MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung ethyl alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky (pasal 4 a
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MAP Pabean Lainnya
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
111017	Pendapatan cukai lainnya adalah Sanksi Administrasi berupa denda (pasal 7 ayat (7) UU No. 11 tahun 1995)
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
<b>41161</b> 411611	Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Meterai
411011	Penerimaan yang berasal dari penggunaan Bea Materai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985.
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	Penerimaan dana hasil Penjualan Benda Materai oleh PT. Pos Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15).
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 Tahun 2000.
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPh yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2000.
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN

	Denorimoen vang heregel deri nembeueren haare den dende nemellen eurolikaten en etab DDM 6 DD-DM 1 DTM
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN & PPnBM dan PTLL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
	Jung diatal poradounance ito. 17 mil 1777 jung tolah diadaan torakin dalam ee ito. 17 mil 2000.
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN & PPnBM dan PTLL
	yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
111/01	
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN & PPnBM dan PTLL
	yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
4119	Pengembalian Pendapatan Pajak dan Cukai
41191	Pengembalian Pendapatan PPh Migas
411911	Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Minyak Bumi (Mata Anggaran 411111)
411912	Pengembalian Pendapatan PPh Gas Alam
711712	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Gas Alam (Mata Anggaran 411112)
	(
411913	Pengembalian Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi (Mata Anggaran 411113)
411010	Dangambalian Dandanatan DDh Migaa Lainn:
411919	Pengembalian Pendapatan PPh Migas Lainnya  Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Migas Lainnya (Mata Anggaran 411119)
	Merupakan kontra pos dan Pendapatan PPH Migas Lainnya (Mata Anggaran 411119)
41192	Pengembalian Pendapatan PPh Non-Migas
411921	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 21 (Mata Anggaran 411121)
411922	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 22 (Mata Anggaran 411122)
411923	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 22 Impor (Mata Anggaran 411123)
411924	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 23
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 23 (Mata Anggaran 411124)
411925	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
411723	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (Mata Anggaran 411125)
	morapakan konka pos dan i ondapakan i i i i asar 20/2 / ording i inada (mata / inggaran i i i i i 20/
411926	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (Mata Anggaran 411126)
111007	
411927	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26  Marupakan kentra pasadari Pandapatan PPh Pasal 34 (Mata Anggaran 411137)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 26 (Mata Anggaran 411127)
411928	Pengembalian Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (Mata Anggaran 411128)
411929	Pengembalian Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya (Mata Anggaran 411129)
41193	Pengembalian Pendapatan PPN
411931	Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri
111701	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPN Dalam Negeri (Mata Anggaran 411211)
411932	Pengembalian Pendapatan PPN Impor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPN Impor (Mata Anggaran 411212)
/11000	Dongombolian Dondonatan DDN Lainnya
411933	Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya  Merupakan kontra nos dari Pendapatan PPN Lainnya (Mata Anggaran 411219)
411933	Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPN Lainnya (Mata Anggaran 411219)

411941	Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
111711	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPnBM dalam Negeri (Mata Anggaran 411221)
	manapananana paranananan anapananan agan (mananaggan manan)
411942	Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPnBM Impor (Mata Anggaran 411222)
411943	Pengembalian Pendapatan PPnBM Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPnBM Lainnya (Mata Anggaran 411229)
41195	Pengembalian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411951	Pengembalian Pendapatan PBB Pedesaan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Pedesaan (Mata Anggaran 411311)
411952	Dangambalian Dandanatan DDD Darkataan
411952	Pengembalian Pendapatan PBB Perkotaan  Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Perkotaan (Mata Anggaran 411312)
	Werupakan kunta pus uan Penuapatan PBB Perkutaan (Wata Anggaran 411312)
411953	Pengembalian Pendapatan PBB Perkebunan
111700	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Perkebunan (Mata Anggaran 411313)
	morapakan konka poo dan i ondapakan i BB i ondabahan (maka /inggaran i i i i o i o
411954	Pengembalian Pendapatan PBB Kehutanan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Kehutanan (Mata Anggaran 411314)
411955	Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Pertambangan (Mata Anggaran 411315)
411956	Pengembalian Pendapatan PBB Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Lainnya (Mata Anggaran 411319)
41196	Pengembalian Pendapatan Pajak BPHTB
411961	Pengembalian Pendapatan BPHTB
111701	Merupakan kontra pos dari Pendapatan BPHTB (Mata Anggaran 411411)
	1 1 1 33 /
41197	Pengembalian Pendapatan Cukai
411971	Pengembalian Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (Mata Anggaran 411511)
411972	Dangambalian Dandanatan Cukai Ethul Alkahal
411972	Pengembalian Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol (Mata Anggaran 411512)
	incrupakan konita pos dan i endapatan cukai Etnyi Aikonoi (inata Anggaran 411512)
411973	Pengembalian Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol (Mata Anggaran 411513)
411974	Pengembalian Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Administrasi Cukai (Mata Anggaran 411514)
411975	Pengembalian Pendapatan Cukai Lainnya  Marupakan kantra pagadari Pendapatan Cukai Lainnya (Mata Anggaran 411510)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Cukai Lainnya (Mata Anggaran 411519)
41198	Pengembalian Pendapatan Pajak Lainnya
411981	Pengembalian Pendapatan Bea Meterai
111751	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Meterai (Mata Anggaran 411611)
411982	Pengembalian Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Penjualan Benda Materai (Mata Anggaran 411612)
411983	Pengembalian Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya (Mata Anggaran 411619)
41199	Dengembalian Dendanatan Runga Denggiban Beiak
41199	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPh
411771	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Penagihan PPh (Mata Anggaran 411621)
	merapakan kontra pos dari i endapatan bunga i enaginan i i ii (iviata Anggaran 411021)
411992	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Penagihan PPN (Mata Anggaran 411622)
L	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

411002	Dongombalian Dandanatan Bunga Danagihan DDnPM
411993	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM (Mata Anggaran 411623)
411994	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Penagihan PTLL (Mata Anggaran 411624)
412	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
412111	Pendapatan Bea Masuk
	Pendapatan yang berasal dari pungutan bea atas barang-barang impor.
412112	Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Dasar UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabean Pasal 25/26
	· ·
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean
112110	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MAP Pabean
	Lainnya
	Lammya
412114	Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
412114	
	Pendapatan bea masuk yang harus dipungut atas penjualan lokal dari produk tujuan ekspor yang telah mendapat fasilitas
	KITE.
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
	Pendapatan pabean lainnya adalah :
	Penerimaan yang berasal dari :
	Sanksi administrasi berupa denda (pasal 37 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995)
	Bunga (pasal 38 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995)
	Dunga (pasar 50 ayat (1) 00 No. 10 tahun 1775)
4122	Dondonatan Dajak/Dungutan Ekonor
	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
41221	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
412211	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
	Penerimaan yang berasal dari ekspor beberapa komoditi tertentu yang terkena Pajak/Pungutan ekspor dan penerimaan
	denda administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak/Pungutan Ekspor
4123	Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
41231	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk
412311	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk
412311	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Masuk (Mata Anggaran 412111)
	ivierupakan kuntra pus uan Penuapatan bea wasuk (wata Anggaran 412111)
412312	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) (Mata Anggaran
	412112)
412313	Pengembalian Pendapatan Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Administrasi Pabean (Mata Anggaran 412113)
412314	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) (Mata
	Anggaran 412114)
	7 ringgaran 172111/
440040	Describeding Describeding Debugging
412319	Pengembalian Pendapatan Pabean Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pabean Lainnya (Mata Anggaran 412119)
41232	Pengembalian Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
412321	Pengembalian Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pajak/pungutan ekspor (Mata Anggaran 412211)
	morupakan kunta pus uan remuapatan rajak/pungutan ekspul (Mata Angyalan 412211)
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak
421	Penerimaan Sumber Daya Alam
4211	Pendapatan Minyak bumi
42111	Pendapatan Minyak Bumi
421111	Pendapatan Minyak Bumi

	Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi, masuk ke Bagian Anggaran 15.06
421112	Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM
421112	Pendapatan lurah Badah Osaha dan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBW
4212	Pendapatan Gas Alam
42121	Pendapatan Gas Alam
421211	Pendapatan Gas Alam
	Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan gas alam, masuk ke Bagian Anggaran 15.06
421212	Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
	programme and pr
1010	
4213	Pendapatan Pertambangan Umum
<b>42131</b> 421311	Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan luran Tetap
421311	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan
	Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara). Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
421312	Pendapatan Royalti Batubara
	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara). Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (BA. 20)
4214	Pendapatan Kehutanan
42141	Pendapatan Dana Reboisasi
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)
421431	Pendapatan IIUPH(IHPH) Tanaman Industri
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421432	Pendapatan IIUPH(IHPH) Bambu
421432	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH) Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH).  Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421434	Pendapatan IIUPH ( IHPH) Hutan Alam
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
42144	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
421441	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
	Pendapatan yang diterima dari Dana Pengamanan Hutan (DPH) , Dana Illegal Logging , Dana Konpensasi Areal Pengganti
42145	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi
421451	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
	Pendapatan yang diterima dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan
42146	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konsevasi Alam
421461	Pendapatan luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau
	Mati (IASL/TA)

	Pendapatan yang diterima dari iuran kepada pemegang izin menangkap, mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian daripadanya yang tidak dilindungi undang-undang dan yang dilindungi undang-undang.
421462	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
121102	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan pariwisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan
	pengasanaan panwisata alam aan alkenakan sekali selama jangka wakta pengasanaan
421463	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)
	Pungutan izin pengusahaan taman buru (PIPTB) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan taman buru dan dikenakan sekali dalam jangka waktu pengusahaan
421464	Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB)
12.1.01	Pungutan Izin Berburu adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin berburu dan dikenakan satu kali pada saat izin berburu dikeluarkan
421465	Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
	Pungutan masuk adalah pungutan yang dikenakan terhdap setiap pengunjung yang masuk ke Taman wisata alam, Taman Nasional dan atau taman Buru
421466	luran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
	uran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata alam (IHUPA) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam yang dikenakan dari hasil usahanya sekali setiap tahun
421467	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA)
	luran Hasil usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin berburu berdasarkan jumlah satwa yang diburu sesuai dengan harga patokan yang berlaku untuk masing-masing jenis satwa yang diburu.
401E	Dandanatan Darikanan
4215 42151	Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan
42151	Pendapatan Perikanan
121011	Penerimaan dari Pungutan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan dari Perusahaan Perikanan dalam rangka PMA/PMDN. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan. (BA.32)
421512	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan  Penerimaan dana kompensasi pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan yang berasal dari Kapal Keruk Pasir Laut.
	Masuk Bagian Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan (BA.32).
4216	Pengembalian Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam
42161	Pengembalian Pendapatan Minyak Bumi
421611	Pengembalian Pendapatan Minyak Bumi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Minyak Bumi (Mata Anggaran 421111)
421612	Pengembalian Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM
421012	Merupakan kontra pos dari Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM (Mata Anggaran 421112)
42162	Pengembalian Pendapatan Gas Alam
421621	Pengembalian Pendapatan Gas Alam
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Gas Alam (Mata Anggaran 421211)
421622	Pengembalian Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
421022	Merupakan kontra pos dari Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa (Mata Anggaran 421212)
42163	Pengembalian Pendapatan Pertambangan
421631	Pengembalian Pendapatan luran Tetap
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan luran Tetap (Mata Anggaran 421311)
421632	Pengembalian Pendapatan Royalti Batubara
74 1004	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Royalti Batubara (Mata Anggaran 421312)
42164	Pengembalian Pendapatan Kehutanan
421641	Pengembalian Pendapatan Dana Reboisasi

	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Dana Reboisasi (Mata Anggaran 421411)
121412	Pongombolian Pondanatan Provisi Sumbor Pova Hutan
421642	Pengembalian Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (Mata Anggaran 421421)
	morapanar noma poe aan romapanar roma oanaa oo ga maan (maa rangga an 12 m2 )
421643	Pengembalian Pendapatan IIUPH(IHPH) Tanaman Industri
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan IHPH Tanaman Industri (Mata Anggaran 421431)
421644	Pengembalian Pendapatan IIUPH(IHPH) Bambu
72 10 77	Merupakan kontra pos dari Pendapatan IHPH Bambu (Mata Anggaran 421432)
	, 33
421645	Pengembalian Pendapatan IIUPH(IHPH) Tanaman Rotan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan IHPH Tanaman Rotan (Mata Anggaran 421433)
421646	Pengembalian Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
12.0.0	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Dana Pengamanan Hutan (Mata Anggaran 421441)
421647	Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (Mata Anggaran 421451)
421648	Pengembalian Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan IIUPH ( IHPH) Hutan Alam (Mata Anggaran 421434)
42165	Pengembalian Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Satwa Liar dan Perikanan
421651	Pengembalian Pendapatan luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut
	Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA) (421461)
404/50	
421652	Pengembalian Pendapatan Perikanan  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Perikanan (Mata Anggaran 421511)
	Merupakan kontra pos dan i endapatan i enkanan (Mata Anggaran 421311)
421653	Pengembalian Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan (Mata
	Anggaran 421512)
421654	Pengembalian Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
	Merupakan kontra pos dari Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) (Mata Anggaran 421462)
10115	
421655	Pengembalian Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)  Merupakan kontra pos dari Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) (Mata Anggaran 421463)
	i Merupakan kuntia pus uan Fungutan 12in Fengusanaan Tanian butu (FIF 15) (Mata Anggaran 421403)
421656	Pengembalian Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB)
	Merupakan kontra pos dari Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB) (Mata Anggaran 421464)
401/57	Dan sambalian Dunau tan Masuli Ohush Wisata Alam
421657	Pengembalian Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam Merupakan kontra pos dari Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (Mata Anggaran 421465)
	Weidpakan kentra pes dan Fangatan Masak espek Wisata Atlani (Mata Atlaggaran 12 1100)
421658	Pengembalian luran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata alam (IHUPA)
	Merupakan kontra pos dari luran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) (Mata Anggaran 421466)
421659	Pengembalian luran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA)
42 1009	Merupakan kontra pos dari luran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA) (Mata Anggaran 421467)
	,
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
	Penerimaan dari laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan Negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada suatu BUMN.
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN perbankan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15.06).
42212	Dondonatan Laba DUMN Non Darbankan
<b>42212</b> 422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
722121	T Chaapatan Laba Dolviiv Ivon i Gibankan

	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN non perbankan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15.06).
4222	Pengembalian Pendapatan atas Laba BUMN
42221	Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422211	Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Laba BUMN Perbankan (Mata Anggaran 422111)
<b>42222</b> 422221	Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
422221	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan (Mata Anggaran 422121)
423	Pendapatan PNBP Lainnya
4231	Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian pertanian, benih dan hasil pertanian dari praktek perkebunan siswa. Masuk Bagian Anggaran Departemen Pertanian (BA.18)
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
423112	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian peternakan dan perikanan, semen beku untuk inseminasi buatan, bibit ternak, calon bibit, ternak susu, ternak afkir, hasil peternakan dan perikanan praktek siswa. Masuk Bagian Anggaran Departemen Pertanian (BA.18)
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
	Penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti dan PPN. Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (BA.20)
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
.20111	Penerimaan dari penjualan hasil sitaan baik berupa uang maupun hasil penjualan barang rampasan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan Agung (BA.06).
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
423113	Penjualan vaksin dan antigen hewan ternak pada Departemen Pertanian (BA 18). Penjualan radioisotop pada BATAN (BA 42.03)
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
423110	Penjualan Informasi, Penerbitan, Film dan Hasil Cetakan lain yang berada di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 20), Departemen Perhubungan (BA 22), Departemen Kesehatan (BA 24), Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (BA.33), Mennegristek (BA.42), Menneg PAN (BA.54), dan BIKN (BA.59)
400117	Description Description Delivers and description of the second se
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan Penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen yang berasal dari penjualan dokumen lelang.
	1 Chermidan amain yang (bisa) ada di semua departemen yang berasai dan penjudian dokumen lelang.
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni.
	Penerimaan yang berasal dari penjualan Cadangan Beras pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni oleh Perum BULOG
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya
	Penjualan yang tidak termasuk penjualan-penjualan di atas.
42312	Pendapatan Penjualan Aset
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
	Penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen tidak termasuk penjualan sewa beli rumah dinas.
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor  Marunakan panarimaan Umum yang (bisa) ada di samua dapartaman
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli
	Penerimaan dari penjualan rumah dinas melalui kontrak sewa beli. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing
0,21	Penerimaan yang berasal dari Penjualan Aset Bekas Milik Asing
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Merupakan penerimaan unum yang (bisa) ada di semua deparlemen	423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
Pendapatan Sewa Godung, Bangunan, dan Gudang		
Pendapatan Sewa Godung, Bangunan, dan Gudang		
Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423132 Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang  Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423133 Pendapatan Sewa Benda-banda Bergerak  Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423139 Pendapatan Sewa Benda-banda Bergerak  Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423139 Pendapatan Sewa Benda-banda Bergerak Lainnya  Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423141 Pendapatan Jasa I  423141 Pendapatan Jasa I  423142 Pendapatan Jasa I  423143 Pendapatan Jasa I  423144 Pendapatan Jasa I  423144 Pendapatan Jasa I  423145 Pendapatan Marian Banda Marian Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)  Pendapatan Ruman Taman Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)  Pendapatan dari penjadah karabi masuk tempah hiburan/taman mapun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPM/menegrisek (BA-42)  Pendapatan Saria Keterangan Visa. Pespor, SM, STNK dan BPKB  Pendapatan Harian Man Harian Saria Keterangan keringrasian intera tami KiTAS, ten linggal tetap di Indonesia dari pendapatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negari, pembuatan SMM, STNK dan BPKB  Pendapatan Maria Man Perlijanan  Pendapatan dari permitakan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan HAM (BA-13)  Pendapatan dari permitakan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan HAM (BA-13)  Pendapatan dari permitakan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Perdapatan dari pendalakan perdapatan (BA 19), bisya hak penguanan frekuran dan suda di Departemen Perdapatan (BA 18), will dari pendalakan Masiana (BA 18), bisya hak penguanan frekuran dari di Departemen Perdapatan (BA 18), bisya hak penguanan frekuran dari pendapatan berah perdapatan penguanan frekuran dari pendapatan pengawasan penguan penguan pendapatan berah dari pendapatan pengawasan pengangan (BA 19	42313	Pendapatan Sewa
Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gutang Merupakan pencrimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423133 Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak Merupakan pencrimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423139 Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Merupakan pencrimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423141 Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Merupakan pencrimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423141 Pendapatan Bumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Bumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Bumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan dari hasi pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, balik yang berada di Lingkungan Departemen Keshatan munjun departemen Perdapatan Uniter dari penjulalah keris masuk tengat hiburanhaman maujuan museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (fisa 29) maujun Departemen Pendidikan Nasional (fisa 23) dan LIPIMonnegristek (fisa 42)  Pendapatan dari penjulalah keris masuk tengat hiburanhaman maujuan meseum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (fisa 29) maujun Departemen Pendidikan Nasional (fisa 23) dan LIPIMonnegristek (fisa 42)  Pendapatan dari penjulahan keris masuk tengat hiburanhaman maujuan meseum yang berada di lingkungan Departemen Pendapatan dari penjulahan keris surak keterangan keris pengatan dari berada di lingkungan Departemen Pendapatan dari pengayanan pembuatan surak keterangan keringgasan antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan Pendapatan dari permitahan hak paten, hak olpis maujun perganjangan Merk di Departemen Hukum dan Pendapatan dari pengatan dari permitahan hak paten, hak olpis maujun perganjangan Merk di Departemen Hukum dan Pendapatan untangan (fisa 19)  Pendapatan Hisk dan Perilipian Pendapatan dari permitahan hak paten, hak olpis maujun perganjangan Merk di Departemen Hukum dan Pendapatan untangan (fisa 19)  Pendapatan Jasa Bendak dari permitahan hak paten, hak olpis maujun perganjangan Merk di Departemen Perda	423131	·
Montpaktan pencerimaan umum yang (bisa) ada di semus departemen		Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen
Montpaktan pencerimaan umum yang (bisa) ada di semus departemen	100100	
Pendapatan Sewa Benda benda Bergerak Monpokan pencimaan umum yang (bisa) ada di somua departomon  Pendapatan Sewa Benda benda Bergerak Lainnya Merupakan pencimaan umum yang (bisa) ada di somua departomon  Pendapatan Sawa Benda benda Tak Bergerak Lainnya Merupakan pencimaan umum yang (bisa) ada di somua departomon  Pendapatan Sawa Benda benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Panah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Gan hasi pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan baik yang berada di Lingkungan Departomen Kesehatan maupun departomen Lainnya.  Pendapatan Gan hasi pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan baik yang berada di Lingkungan Departomen Kesehatan maupun departomen Lainnya.  Pendapatan Gan penjalan karatis masiak (ompat hiburantaman maupun musuan yang berada di Lingkungan Departomen Kehutanan (BA 29) maupun Departomen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPIMennegristek (BA 42)  Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Visa, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Pispor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surai Kelerangan, Baka Dalam Baka Baharan Pendapatan Baharan Pendapatan Baharan Baharan Baharan Baharan, Jasa Pekerjaan Pendapatan Baharan Baharan Baharan Baharan, Jasa Pekerjaan Pendapatan Baharan Baharan Baharan Baharan, Jasa Pekerjaan Pendapatan Baharan B	423132	i v
Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423139 Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423141 Pendapatan Jusa I Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Koschatan maupun departemen lainnya.  Pendapatan Tempat Hiburan Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan dari penjuatan karcis masuk tempat hiburantaman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehubanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Masional (BA 29) dan HeliMemogrisisk (BA 42)  Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STINK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STINK dan BPKB Oleh PORIK pendapatan dari pendapatan surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin linggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA 13)  Pendapatan dari permataan baik patan, bak cipla maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaltaran pendaltaran pengalian mutu barang dan penbuatan laiho dola-lobatal pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib dariar penushaan, pengujuan mutu barang dan sertifikas mutu barang di Departemen Pertaniarian dariaka perdagangan (BA 19), baya hak pengianan fekuensi Tadio barang di Pendapatan Berdapatan Berdapatan Departemen Perdapatan Berdapatan Berkapatan Berdap		Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen
Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423139 Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  423141 Pendapatan Jusa I Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Koschatan maupun departemen lainnya.  Pendapatan Tempat Hiburan Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan dari penjuatan karcis masuk tempat hiburantaman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehubanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Masional (BA 29) dan HeliMemogrisisk (BA 42)  Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STINK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STINK dan BPKB Oleh PORIK pendapatan dari pendapatan surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin linggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA 13)  Pendapatan dari permataan baik patan, bak cipla maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaltaran pendaltaran pengalian mutu barang dan penbuatan laiho dola-lobatal pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib dariar penushaan, pengujuan mutu barang dan sertifikas mutu barang di Departemen Pertaniarian dariaka perdagangan (BA 19), baya hak pengianan fekuensi Tadio barang di Pendapatan Berdapatan Berdapatan Departemen Perdapatan Berdapatan Berkapatan Berdap	423133	Pendanatan Sewa Benda-henda Bergerak
Pendapatan Sewa Benda benda Tak Bergerak Lainnya Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  42314 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehalan Lainnya Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehalan Lainnya Pendapatan dari Barja pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehaian maupun departemen lainnya.  423142 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Parlwisata Alam (PUPA) Pendapatan dari penjudah karcis masuk kempal hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPIMennegristek (BA 42)  423143 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Gari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM. STNK dan BPKB Pendapatan dari pendapatan dari surat keterangan keimigrasian anlara lain KITAS, Liri linggal telap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA 13)  423144 Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permirilasan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13). Pendapatan dari permirilasan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13). Pendapatan dari permirilasan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13). Pendapatan dari permirilasan berahakan pengalaman permakan pengalam dari permirilasan dari permirilasan berahakan permakan pengalaman dari permirilasan dari permirilasan berahakan permakan pengalaman berahakan dari permirilasan dari permirilasan dari permirilasan dari permirilasan dari permirilasan dari perdapangan Merk di Departemen Hukum dan Perundangan dari perdapatan pengabatan pengabata	720100	·
Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen  Pendapatan Jasa I Pendapatan Mumah Sakit dan Insiansi Keschatan Lainnya Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Insiansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya.  Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Insiansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya.  Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPI/Mennegristek (BA 42)  Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPI/Mennegristek (BA 42)  Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Pendapatan dari permintaan bak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang portanang/techraskan di Departemen Pertanan (BA 18), kayili daflar perusahara, pengulian mulu barang dan settifikas mulu barang di Departemen Perlandustrian dan/atau Perdapangan (BA 19), blaya hak penggunaan rekuensi radio, biaya ilija amalir radio di Dep Perthubungan, hak dan perlijinan Departemen Tenaga Kerja (BA 26), hak dan perlijinan di BPN (BA 56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, jasa informasi, Jasa pelatihan dan jasa teknologi sesual dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen Pendapatan BPN (Ba Asa)  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, jasa informasi, Jasa pelatihan dan jasa teknologi sesual dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen Pendapatan BPN (Beparan mariakan) pengabatan Jasa pendapatan Jasa Bendar Udara. Kepelabuhan, dan Kena		morapanan penerintaan amam jang (siesi) ada areemaa departemen
Pendapatan Jasa I  423141 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan dari hasii pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya.  423142 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan dian penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehulanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPI/Mennogristek (BA 42)  423143 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan dari pelayaran penbuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Pendapatan dari pendapatan surat keterangan kelimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)  423144 Pendapatan Hak dan Perlijinan Pendapatan Hak dan Perlijinan Pendapatan Hak dan Perlijinan Pendapatan pentilatan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penalitian dan pembuatan iabel obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Perindustrian dari Perdagangan (BA 13), Pendapatan Sim, Pendapatan Jasa Tenga, Pekerjaan, Informasi, Jasa pelatihan dan Jasa teknologi sesual dengan tugas dan fungi di seluruh departemen. Pendapatan Jasa Pendapatan Jasa Bandar U	423139	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kosehatan Lainnya Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya.  Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan dari penjualan Karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPI/Mennegristek (BA 42)  Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Oleh PDLR, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)  Pendapatan Hak dan Pertijinan Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil pendilitan dan pembuatan label obat-dolata pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian multu barang di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian multu barang di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian multu barang di Departemen Pertanian (BA 18), berapatan Berapat		Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen
Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kosehatan Lainnya Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya.  Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan dari penjualan Karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPI/Mennegristek (BA 42)  Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Oleh PDLR, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)  Pendapatan Hak dan Pertijinan Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil pendilitan dan pembuatan label obat-dolata pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian multu barang di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian multu barang di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian multu barang di Departemen Pertanian (BA 18), berapatan Berapat		
Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya.  423142 Pendapatan Tempat Hiburan/TamanMuseum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan Tempat Hiburan/TamanMuseum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun unseum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (Bu 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (Bd 23) dan LIPIMennegristek (Bd 42)  423143 Pendapatan Surat Kelerangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surat Kelerangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Oleh POLRI, pendapatan dari surat kelerangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (Bd 13) Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permintanan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pesisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan berialan pertainan/betemakan di Departemen Pertainan (BA 18), wajib dafan perusushaan, pengujam mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijii amalit radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil telang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensori/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensori/Karantina, Pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendapatan Jasa Tenaga, pekerjaan, jasa inempai, jasa pekerjaan jasa pendapatan Jasa Tenaga, pekerjaan, jasa inempai, jasa perkapatan dari pasa tenaga, pekerjaan jasa pendapatan Jasa Benaga, jasa pekerjaan, jasa inempai penganan kerutama pencatatan nikah dan rujuk		·
Kesehatan maupun departemen lainnya.  423142 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)  Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPI/Mennegristek (BA 42)  423143 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB  Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB Oleh POLRI, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin linggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA 13)  Pendapatan Hak dan Perijinan  Pendapatan Hak dan Perijinan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang di an serifikias mutu barang di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang di an serifikiasi mutu barang di pepartemen Pertanian (BA 18), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karanitina, pengawasan, pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karanitina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdaganan pasa pelahanan dan pendagatan pasa teknologi sesuai dengan tugas dan tungsi di seluruh departemen. Perdapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran dan pembuatan tuntuk pertama kali, pem	423141	, ,
Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/laman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPIMennegristek (BA 42)  423143 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB den PoNLRI, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA 13)  423144 Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permintanan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendataran peslisida, royalit hasil penditian dan pembuatan label obat-dasta pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daltar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikas mutu barang di Departemen Perindustrian danfatau Perdapangan (BA 19), biaya hak penggunasan frekuensir radio, biaya jih amalir radio di Dep Perthubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA 26), hak dan perijinan di BPN (BA 56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, jasa informasi, Jealatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, jasa informasi, Jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendataran tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemelharana data pendafataran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribus tanah, pelayanan pendafaran tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemelharana data pendafatan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribus tanah, pelayanan penderitan peng		
Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/laman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPIMennegristek (BA 42)  423143 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB den PoNLRI, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA 13)  423144 Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permintanan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendataran peslisida, royalit hasil penditian dan pembuatan label obat-dasta pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daltar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikas mutu barang di Departemen Perindustrian danfatau Perdapangan (BA 19), biaya hak penggunasan frekuensir radio, biaya jih amalir radio di Dep Perthubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA 26), hak dan perijinan di BPN (BA 56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, jasa informasi, Jealatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, jasa informasi, Jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendataran tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemelharana data pendafataran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribus tanah, pelayanan pendafaran tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemelharana data pendafatan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribus tanah, pelayanan penderitan peng	423142	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPIMennegristek (BA 42)  423143 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB oleh POLRI, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal telap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)  Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari perdataran pestisida, royalti hasil penelilitan dan pembuatan tabel obat-obata pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan seritikasa mutu barang di Departemen Perindustrian dian/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya jila mamitir radio di Dep Pertibuungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan Jasa Tenaga, Jasa pekerjaan, Jasa Informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen, Pendapatan BPN (pelayanan pendatranan tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetasan tanah untuk pertama kali, peneliharan data pendafaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemetiksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintan pengeri dan luar negeri, penda	5112	
Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB oleh POLRI, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)  Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA.13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA.18), wajib dattar perusahaan, penujujan mutu barang di Departemen Pertanian (BA.18), wajib dattar perusahaan, penujujan mutu barang di Departemen Perindustrian dantatau Perdagangan (BA.19), laya hak penggunaan frekuensi radio, biaya iji amatir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA.18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA.19), Departemen Pendapatan BPN. Pendapatan DBC  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelaltihan, Teknologi, Pendapatan BPN. Pendapatan DJBC  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan Konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan Konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertamak hali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan fiormasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian pener		
Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB oleh POLRI, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)  Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA.13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA.18), wajib dattar perusahaan, penujujan mutu barang di Departemen Pertanian (BA.18), wajib dattar perusahaan, penujujan mutu barang di Departemen Perindustrian dantatau Perdagangan (BA.19), laya hak penggunaan frekuensi radio, biaya iji amatir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA.18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA.19), Departemen Pendapatan BPN. Pendapatan DBC  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelaltihan, Teknologi, Pendapatan BPN. Pendapatan DJBC  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan Konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan Konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertamak hali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan fiormasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian pener		
BPKB oleh POLRI, pendapatan dari sural keterangan kelmigrasian antara lain KITAS, izin linggal letap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)  423144 Pendapatan Hak dan Perijinan  Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obata pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daltar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikas mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya jii amalir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (poste)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan Jasa tenaga, Jasa pekerjaan, Jasa informasi, Jasa pelatihan dan Jasa teknologi sesual dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi; pengukuran dan penelaan lanah untuk pertama kali, pemeliharaan daha pendaftaran tanah, pelayanan konsidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsidasi tanah secara swadaya, pelayanan Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Pendapatan J	423143	
Departemen Hukum dan HAM (BA.13)  423144 Pendapatan Hak dan Perijinan  Pendapatan Hak dan Perijinan  Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA.13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalil hasil penelitian dan pembuatalan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA.18), walib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikas mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA.19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijii amatir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA.18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA.19), Departemen Pendidikan Nasional (BA.23), Departemen Kesehatan (BA.24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan Jasa Tenaga, Jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharanan data pendaftaran tanah, pelayanan konsidiasi lanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Pendapatan dari jasa perveberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA.22)  P		
423144 Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatal pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikas mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan jasa tenaga, Jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan lugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama Pendapatan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa pendapatan jasa perkapalan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan Jasa II L		
Pendapatan dari permintaan hak palen, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelilian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijia amalir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan/Pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, Informasi, pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, Informasi, pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendap		Departement rational (Britte)
Pendapatan dari permintaan hak palen, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelilian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijia amalir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan/Pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, Informasi, pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, Informasi, pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendap	423144	Pendanatan Hak dan Perijinan
undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaflaran pestisida, royalli hasil penelilian dan pembuatan label obal-obalai pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertiian mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya iji amatir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Peranian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan Pendaftaran tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan penguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa pengaban, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jas	120111	,
mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijii amalir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa pensekapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.		undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan
amatir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Deparfemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)  Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan  Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa J Lainnya  Pendapatan Jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.		pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi
Termasuk Hasil lelang 3G (postel)  423145 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24) Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.		
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan Jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.		
Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  423148 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jasa II		l ermasuk Hasil lelang 3G (postel)
Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  423148 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jasa II	123115	Pendanatan Sensor/Karantina Pengawasan/Pemeriksaan
Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  423148 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan Jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  42315 Pendapatan Jasa II	723173	·
(BA 24)  423146 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC  Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jasa I Lainnya  Pendapatan Jasa Jasa II		
Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  Pendapatan Jasa II  Pendapatan Jasa II  Pendapatan Jasa II		
Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  Pendapatan Jasa II  Pendapatan Jasa II  Pendapatan Jasa II		
di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama Penerimaan dari jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan Jasa Jasa I Lainnya Pendapatan Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Ja	423146	
untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  Pendapatan Jasa II  Pendapatan Jasa II		
redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.  423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  423148 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.		
423147 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  423148 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.		
Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  423148 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.		dan kepabeanan.
Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama  423148 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Dondanatan Jaca Kantar Hrusan Agama
Agama  Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  Pendapatan Jasa II	42314/	i v
423148 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  42315 Pendapatan Jasa II		
Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  Pendapatan Jasa II  Pendapatan Jasa II		
navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  Pendapatan Jasa I Lainnya  Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  Pendapatan Jasa II  Pendapatan Jasa II	423148	
pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  42315 Pendapatan Jasa II		
(BA 22)  423149 Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  42315 Pendapatan Jasa II		navigasi dan pendapatan jasa perkapaian, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara,
423149 Pendapatan Jasa I Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  42315 Pendapatan Jasa II		
Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  42315 Pendapatan Jasa II		
Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.  42315 Pendapatan Jasa II	423149	Pendapatan Jasa I Lainnya
42315 Pendapatan Jasa II		·
1/2151 Dendanatan Jasa Lembaga Koyangan (Jasa Ciro)		·
	423151	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Pendapatan yang berasal dari bunga rekening giro pemerintah		Pendapatan yang berasal dari bunga rekening giro pemerintah

423152	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
420102	Penerimaan dari pungutan operator telekomunikasi yang memperoleh ijin resmi telekomunikasi dan penerimaan jasa telekomunikasi pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)
423153	Pendapatan luran Lelang untuk Fakir Miskin  Pendapatan yang berasal dari sebagian hasil lelang penghapusan BMN yang dialokasikan untuk Fakir Miskin dan berasal dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga serta disetorkan atas nama Kementerian Sosial (BA 27).
	dan solaran Kementenan Negarar zembaga sorta disetorkan dias hama Kementenan sosial (BA 27).
423154	Pendapatan Jasa Catatan Sipil
	Penerimaan dari hasil pelayanan jasa Kantor Catatan Sipil.Masuk Pendapatan Departemen Dalam Negeri
423155	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
420100	Pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk Departemen Keuangan (BA 15)
423156	Dandanatan Hang Dawarganagaraan
423130	Pendapatan Uang Pewarganegaraan  Pendapatan yang berasal dari uang registrasi menjadi warga Negara Indonesia, masuk Departemen Hukum dan HAM (BA 13).
423157	Pendapatan Bea Lelang
	Pendapatan yang diperoleh dari bea lelang dan masuk ke Departemen Keuangan (BA 15).
423158	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
	Pendapatan yang berasal dari Jasa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Masuk Departemen Keuangan (BA 15)
423159	Pendapatan Jasa II Lainnya
120107	Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa II.
42316	Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri
423161	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI Pendapatan dari surat perjalanan RI dan masuk ke Bagian Anggaran Departemen Luar Negeri (BA 11)
423162	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
	Pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler dan masuk Bagian anggaran Departemen Luar Negeri (BA 11)
423169	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
423107	Pendapatan dari luar negeri selain surat perjalanan RI dan pengurusan dokumen konsuler.
42317	Pendapatan Bunga
423171	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi
423172	Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi
120172	Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi
423173	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
	Pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas
423179	Pendapatan Bunga Lainnya
423179	Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya
42318	Pendapatan Gain on Bond Redemption
423181	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Pendapatan yang diperoleh dari perbedaan antara nominal dan clean price karena pemerintah membeli kembali SUN ( cash buy back) pada harga diskon(dibawah par).
42319	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423191	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
423192	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing

4232	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42321	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423211	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
	Penerimaan legalisasi tanda tangan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Hukum dan HAM (BA 13)
423212	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
 	Pengesahan surat di bawah tangan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Hukum dan HAM (BA 13)
423213	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
	Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 05)
400044	
423214	Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
	Hasil denda, denda tilang di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 06)
423215	Pendapatan Ongkos Perkara
120210	Pendapatan dari ongkos perkara di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 06)
	- Chaptan and Signor Forma and Signor Spane and Signor Spane and S
423219	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya
	Menampung jenis penerimaan selain pendapatan kejaksaan dan peradilan tersebut diatas
4233	Pendapatan Pendidikan
42331	Pendapatan Pendidikan
423311	Pendapatan Uang Pendidikan
	Uang pendidikan berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun di departemen lain.
	rendidikan Nasional maupun di departemen lain.
423312	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
723312	Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir pendidikan yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang
	menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Dep. Pendidikan Nasional (BA 23) maupun di departemen lain.
423313	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
	Uang Ujian untuk menjalankan Praktek yang berasal dari Sekolah Maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di
	lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (BA 23)maupun di departemen lain.
400040	
423319	Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Uang pendapatan pendidikan lainnya seperti sumbangan pendidikan yg berasal dari Sekolah Maupun PTN yg menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Dep. Pendidikan Nasional (BA 23) maupun di departemen lain.
	Therry oronggaranan portainan at migrangan popin shalaman nasional (p. 126) maapan arabparemen aan
4234	Pendapatan Lain-lain
42342	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu
423421	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423422	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
400400	December of Kenthall Delevis Leisung DM TAVI
423423	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL  Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
	і імегиракан репенінаан онійні уанд (bisa) айа йі semua departemen
423424	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
74374	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423425	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423426	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
42343	Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
423431	Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	Penerimaan negara yang berasal dari pendapatan laba bersih penjualan BBM yaitu selisih hasil penjualan BBM dalam negeri dengan biaya pengadaan BBM. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15.06)
	negen dengan biaya pengadaan bibivi. iviasuk bayian Anggaran bepartemen kedangan (BA. 15.00)
42344	Pendapatan Pelunasan Piutang
74344	i ondapatan i olunasan i lutang

423441	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Piutang Non Bendahara. Piutang non bendahara terjadi karena kelalaian
	pegawai yang menyebabkan kerugian negara di luar pengurusan keuangan negara.
423442	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan TP/TGR bendahara. TP/TGR Bendahara terjadi karena ada kerugian
	negara yang disebabkan kesalahan atau kelalaian bendahara dalam rangka pengurusan keuangan Negara. Merupakan
	penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen.
400.45	
42345	Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Berjalan
423451	Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAB
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423452	Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAB
423432	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
	rembetulari yang uliaksariakan oleh birektorat senderai rembendariaraan.
423453	Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAB
423433	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
	Temberdian yang dilaksanakan oleh bil ektorat senderan rebendanaraan.
423454	Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB
120 107	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
	. Shibstaran yang anaksanakan olon biroktorat sondorar i Gibertaanatan.
423455	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAB
0.00	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
	1 on botham yang anakoanakan olon biroktorak sondorar 1 orbothamatan.
423456	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB
120100	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
42346	Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
423461	Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423462	Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423463	Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423464	Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423465	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423466	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
40047	Douglandton Lain Iain
42347	Pendapatan Lain-lain  Pendapatan Kambali Perseket/Heng Muke Cali
423471	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji  Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423472	Dandanatan Danda Katarlambatan Danyalasaian Dakariaan Damarintah
423472	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah  Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
	іметиракан рененінаан оншін уану (міза) айа йі зенійа йераценнен
423473	Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB
423473	Merupakan penerimaan dari Badan Pertanahan Nasional
	тиотиракан репенниан чан рачан г спананан туазина
423474	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
423474	i cheminaan richii renjaminan renjaman Nasional
42347F	Pendanatan Denda Pelanggaran di Ridang Pasar Modal
423475	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
423475	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal

	Merupakan pendapatan yang berasal dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
423477	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
423477	Merupakan penerimaan yang berasal dari Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
423479	Pendapatan Anggaran Lain-lain Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen.
4235	Pengembalian Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa
42351	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423511	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (Mata Anggaran 423111)
423512	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan (Mata Anggaran 423112)
423513	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
120010	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (Mata Anggaran 423113)
423514	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan (Mata Anggaran 423114)
423515	Pengembalian Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya (Mata Anggaran 423115)
423516	Pengembalian Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya (Mata Anggaran 423116)
423517	Pengembalian Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
120017	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan (Mata Anggaran 423117)
423518	Pengembalian Pendapatan Penjualan Lainnya  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Lainnya (Mata Anggaran 423119)
423519	Pengembalian Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni.
120017	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Penjualan Cadangan Beras pemerintah dalam Rangka Operasi Pasar Murni (423118)
42352	Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset
423521	Pengembalian Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah (Mata Anggaran 423121)
423522	Pengembalian Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor (Mata Anggaran 423122)
423523	Pengembalian Pendapatan Penjualan Sewa Beli Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Sewa Beli (Mata Anggaran 423123)
423524	Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing (Mata Anggaran 423124)
423525	Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan (Mata Anggaran 423129)
42353	Pengembalian Pendapatan Sewa
423531	Pengembalian Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
_	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri (Mata Anggaran 423131)
423532	Pengembalian Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang (Mata Anggaran 423132)
423533	Pengembalian Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak

	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak (Mata Anggaran 423133)
400500	December 1 and Decemb
423539	Pengembalian Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya (Mata Anggaran 423139)
	Merupakan kunta pus uan Fendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya (Mata Anggaran 423134)
42354	Pengembalian Pendapatan Jasa I
423541	Pengembalian Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Mata Anggaran 423141)
423542	Pengembalian Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
	(Mata Anggaran 423142)
423543	Pengembalian Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB
120010	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB (Mata Anggaran 423143)
	33 7
423544	Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hak dan Perijinan (Mata Anggaran 423144)
423545	Pengembalian Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
.20010	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan (Mata Anggaran 423145)
423546	Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, BPN, DJBC
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC (Mata Anggaran 423146)
	Telluapatan DDDC (Wata Anggaran 425140)
423547	Pengembalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama (Mata Anggaran 423147)
4225.40	Dennembellen Dendensten, Jose Denden IIIdans Kanalakukan, dan Kanalakukan
423548	Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian (Mata Anggaran 423148)
	Werdpakan kontra pos dan i endapatan sasa Bandar Odara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian (wata Anggaran 423140)
423549	Pengembalian Pendapatan Jasa I Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa I Lainnya (Mata Anggaran 423149)
42355	Pengembalian Pendapatan Jasa II
423551	Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (Mata Anggaran 423151)
400550	December 1 of December 1 of December 1 of December 2 of De
423552	Pengembalian Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi (Mata Anggaran 423152)
	merupakan kontra pos dan i endapatan sasa i engelenggaraan retekontunikasi (wata Anggaran 423132)
423553	Pengembalian Pendapatan luran Lelang untuk Fakir Miskin
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan luran Lelang untuk Fakir Miskin (Mata Anggaran 423153)
423554	Pengembalian Pendapatan Jasa Catatan Sipil
423004	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Catatan Sipil (Mata Anggaran 423154)
	morapatar total pool data to marpatar odea oditatar otp. (mata i miggarar 12010 t)
423555	Pengembalian Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Mata Anggaran 423155)
423556	Pengembalian Pendapatan Uang Pewarganegaraan
120000	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Pewarganegaran (Mata Anggaran 423156)
423557	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Lelang (Mata Anggaran 423157)
423558	Pengembalian Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
0000	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (Mata Anggaran 423158)
423559	Pengembalian Pendapatan Jasa II Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa II Lainnya (Mata Anggaran 423159)
42356	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri
	To the state of th

423561	Pengembalian Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
423301	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI (Mata Anggaran 423161)
	i werupakan kontra pos dan r endapatan dan r embenan Surat r enjalahan Ki (wata Anggaran 423101)
423562	Pengembalian Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
423302	
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler (Mata Anggaran 423162)
423563	Dongombolian Dondonatan, Dutin Lainnya dari Luar Nogori
423003	Pengembalian Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri  Manunakan kantra nasadari Pendapatan Putin Lainnya dari Luar Negeri (Mata Anggaran 433170)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri (Mata Anggaran 423169)
40057	
42357	Pengembalian Pendapatan Bunga
423571	Pengembalian Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi (Mata Anggaran 423171)
423572	Pengembalian Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi (Mata Anggaran 423172)
423573	Pengembalian Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman (Mata Anggaran 423173)
423574	Pengembalian Pendapatan Bunga Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Lainnya (Mata Anggaran 423179)
42358	Pengembalian Pendapatan Gain on Bond Redemption
423581	Pengembalian Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka
	Panjang (423181)
42359	Pengembalian Pendapatan Premium atas Ob;igasi Negara
423591	Pengembalian Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
.2007.	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Premium Obligasi Negara dalam Negeri/Rupiah (423191)
	morapanan kontra pos dan i ondapanan i romani osingasi nogara dalam nogoni napian (1201771)
423592	Pengembalian Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
720072	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Premium Obligasi Negara dalam Valuta Asing (423192)
	Wishapakan kontra pos dan i endapatan i remiam obligasi Negara dalam valda issing (123172)
4236	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42361	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423611	Pengembalian Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
423011	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (Mata Anggaran 423211)
	ivierupakan kunta pus uan Penuapatan Legansasi Tahua Tangan (wata Anggaran 423211)
423612	Dengembelian Dendengton Dengesehen Curat Dibawah Tengan
423012	Pengembalian Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan (Mata Anggaran 423212)
	Merupakan kontra pos dan Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan (Mata Anggarah 423212)
400/40	December 1 on December 11 on Marie (Lean A) double to December 12 on December (December 12 on A)
423613	Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) (Mata
	Anggaran 423213)
400/44	Donnesshalian Dandanatan Hasil Danda/Tilan sa basa sha sa basa basa basa basa basa
423614	Pengembalian Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya (Mata Anggaran 423214)
10011=	
423615	Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Ongkos Perkara (Mata Anggaran 423215)
423616	Pengembalian Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya (Mata Anggaran 423219)
4237	Pengembalian Pendapatan Pendidikan
42371	Pengembalian Pendapatan Pendidikan
423711	Pengembalian Pendapatan Uang Pendidikan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Pendidikan (Mata Anggaran 423311)
423712	Pengembalian Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan (Mata Anggaran
	423312)

423713	Pengembalian Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
1207.10	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek (Mata Anggaran 423313)
423714	Pengembalian Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pendidikan Lainnya (Mata Anggaran 423319)
4220	Dengambalian Dandanatan Lain lain
4238 42381	Pengembalian Pendapatan Lain-lain Pengembalian Pendapatan Lain-lain
423811	Pengembalian Pendapatan Lahi-lalil Pengembalian Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
423011	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak (Mata Anggaran 423431)
	morapakan konka pos dan i ondapakan zasa Borsin riasir i onjadian bahan kimiyak (mata ringgaran 120 to t)
423812	Pengembalian Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara (Mata Anggaran 423441)
422012	Describe lies Described Delivered Costi Duri stoc Konneion von Diderite Oleh Negres (Masul TD/TCD) Described
423813	Pengembalian Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR)
	Bendahara (Mata Anggaran 423442)
	33 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
423814	Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (Mata Anggaran 423471)
423815	Pengembalian Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
423013	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Mata Anggaran
	423472)
423816	Pengembalian Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB
120010	Merupakan kontra pos dari Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB (Mata Anggaran 423473)
423817	Pengembalian Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional (Mata Anggaran 423474)
423818	Dengembelian Dendengton Dende Delanggeren di Didang Deser Medel
423616	Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal  Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal (Mata Anggaran 423475)
	Merupakan kontra pos dan i endapatan benda i etanggaran di bidang i asar Modar (Mata Anggaran 425475)
423819	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Anggaran Lain-lain (Mata Anggaran 423479)
42382	Pengembalian Pendapatan Lain-lain II
423821	Pengembalian Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) (Mata Anggaran 423476)
423822	Pengembalian Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi  Marupakan kantra nga dari Pendapatan Registrasi Pektar dan Pektar Ciri (Mata Anggaran 433477)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Mata Anggaran 423477)
424	Pendapatan PNBP Lainnya I
4241	Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
42411	Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
424111	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan
424112	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara
424112	r enuapatan gratilikasi yang ultetapkan KFK menjaul milik negata
424113	Pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan.
4245	Pengembalian Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
4245	Pengembalian Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi  Pengembalian Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
424511	Pengembalian Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan
10 11	Merupakan kontra pos dari pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan
424512	Pengembalian Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara
	Merupakan kontra pos dari pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara

424513	Dengambalian pendangtan dari pengambalian penyalahgungan penyalanggaraan keyangan
424513	Pengembalian pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan.
	Merupakan kontra pos dari pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan negara
40	Denoritore a Ulhah
43	Penerimaan Hibah
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111	
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari perorangan. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
401110	Develop the 19th b Delay Many 2. Leagh on 10 dea 11 de
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
	Берапеннен (егкан)
121110	Dandanston Hibah Dalam Magari Lainnya
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya
	Penerimaan hibah dalam negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
	berbentuk badan nukum. (bA.15 atau bA. Departemen terkan)
4212	Dondonoton Hibah Luar Norari
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
<b>43121</b> 431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan
431211	Pendapatan Hiban Luar Negeri – Perorangan Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari perorangan. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
	r cheninaan nivan negen yang verasai uan perurangan. (DA. 13 atau dA. Departemen terkait)
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral
401717	Pendapatan Hiban Luar Negeri – Bilateral Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral. (BA.15 atau BA.
	Departemen terkait)
	Departement terkung
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral
431213	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral. (BA.15 atau BA.
	Departemen terkait)
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya
401217	Penerimaan hibah luar negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral
	maupun multilateral. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
432	Pengembalian Pendapatan Hibah
4321	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43211	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri
432111	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan (Mata Anggaran 431111)
	The species of the second state of the second secon
432112	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha (Mata Anggaran 431112)
432119	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya (Mata Anggaran 431119)
	J - J - (
4322	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri
43221	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri
432211	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan (Mata Anggaran 431211)
432212	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral (Mata Anggaran 431212)
432213	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral (Mata Anggaran 431213)
432214	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya (Mata Anggaran 431219)
5	BELANJA NEGARA

511	Belanja Gaji dan Tunjangan
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111	Belanja Gaji PNS
51111	Belanja Gaji Pokok PNS
311111	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipii
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS
011117	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
	r engeladran antak pembayaran pembalatan gaji pokok r egawar vegen cipii
51112	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS
511122	Belanja Tunj. Anak PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS
511125	Belanja Tunj. PPh PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS
E44407	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
F11107	Delayis Turi Varrabalan DNC
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan PNS
511128	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
311120	
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik)
	tagas yang anaksanakannya (organik aan non organik)
511129	Belanja Uang Makan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS
51113	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS
511132	Belanja Tunj. Cacat PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS
511133	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS
F14404	
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan
	pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selam ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No.
	SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
311133	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS
	r engetuaran untuk pembayaran tunjangan uaeran terpentih/sangat terpentih 7NS
511136	Belanja Tunj. Kewanitaan PNS
311130	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kewanitaan PNS
	r ongotaaran untuk pembayaran tunjangan kewanitaan rino
511137	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
011101	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
	r ongotaaran antak pombayaran tanjangan garakaosenin tivo yang alpekerjakan pada sekolahir i Swasta Fito
511138	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	kan Pasca
Belanja Tunj, Sewa Rumah PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN)  Belanja Tunj, Restitusi Pengebatan PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Pengebatan PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sauransi kecelakan PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain tarin termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain tarin termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/lambahan tunjangan umum PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/lambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/PQ Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN)  Belanja Tunj, Restitusi Pengobatan PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pengopantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN)  Belanja Tunj, Social Security PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN)  Belanja Tunj, Asuransi Kecelakaan PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lan lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lan lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan untum PNS  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan untum pensaturan presiden no 12 tahun 2006  Belanja Tunjangan Umum PNS  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan untum pensaturan presiden no 12 tahun 2006  Belanja Gaji dan Tunjangan TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suamikistri TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suamikistri TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sruktural TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sruktural TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sruktural TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suamikistri TNIPOLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suamiki	
Pengeluaran untuk penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN)  511143 Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN)  511144 Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)  511145 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  511146 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)  Fengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511148 Belanja Lokal Staff Lainnya  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/PO  51121 Belanja Gaji than Tunjangan TNI/POIRI  51121 Belanja Gaji than Tunjangan TNI/POIRI  51122 Belanja Gaji than Tunjangan TNI/POIRI  51123 Belanja Gaji than Tunjangan TNI/POIRI  51124 Belanja Tunjangan-Umanan INI/POIRI  51125 Belanja Tunjangan-Umanan INI/POIRI  Fengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Pen	
Belanja Tunj; Social Security PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN)  511144 Belanja Tunj; Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)  511145 Belanja Tunj; Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  511147 Belanja Tunj, Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511148 Belanja Lokal Staff Lainnya Pengeluaran untuk pembayaran uang tembur lokal staff  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS Pengeluaran untuk pembayaran unjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNIPP peraturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji Dokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembalatan gaji pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembalatan gaji pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembayaran pembalatan gaji pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/isri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sarakitural TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)  Fengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  Fengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  Fengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri PNS (staff di LN)  Fengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal staff  Filita Belanja Lokal Staff Lainnya  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS  Fengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Poperaturan prosiden no 12 tahun 2006  Filita Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  Filita Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan saruktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)  511145 Belanja Tunj, Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  511146 Belanja Tunj, Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  511147 Belanja Tunj, Lain tain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain tain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain tain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511148 Belanja Lokal Staff Lainnya  Pengeluaran untuk pembayaran uang tembur lokal staff  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Poperaturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji Hokok TNI/POLRI  51121 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  511229 Belanja Tunj. Suami/tsri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/tsri TNI/POLRI  511220 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511221 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan siruktural TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan siruktural TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan siruktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan siruktural TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)  511145 Belanja Tunj, Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  511146 Belanja Tunj, Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  511147 Belanja Tunj, Lain tain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain tain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain tain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511148 Belanja Lokal Staff Lainnya  Pengeluaran untuk pembayaran uang tembur lokal staff  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Poperaturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji Hokok TNI/POLRI  51121 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  511229 Belanja Tunj. Suami/tsri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/tsri TNI/POLRI  511220 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511221 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan siruktural TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan siruktural TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan siruktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan siruktural TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)  511146 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511148 Belanja Cakal Staff Lainnya  Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal staff  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/PQ  peraturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI  51121 Belanja Gaji Tokok TNI/POLRI  51121 Belanja Gaji Fokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI  51122 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI	
Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)   Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)   Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)   Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri   Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri   Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal staff   Belanja Tunjangan Umum PNS	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)  511147 Belanja Tunj, Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511148 Belanja Lokal Staff Lainnya Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal staff  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Poperaturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 51121 Belanja Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  51121 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511148 Belanja Lokal Staff Lainnya Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal staff  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS  51116 Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/PO peraturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji TNI/POLRI 51121 Belanja Gaji TNI/POLRI 51121 Belanja Gaji TNI/POLRI 51121 Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  51121 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  51122 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511226 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511227 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri  511148 Belanja Lokal Staff Lainnya Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal staff  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Po peraturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/PoIri 51121 Belanja Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/Istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  511226 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  511227 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
511148 Belanja Lokal Staff Lainnya Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal staff  51115 Belanja Tunjangan Umum PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Poperaturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 51121 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 51121 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI  511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal slaff  Belanja Tunjangan Umum PNS  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Poperaturan presiden no 12 tahun 2006  Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri  51121 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  511221 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  511222 Belanja Tunjangan-tunjangan ITNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suamii/istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI	
51115 Belanja Tunjangan Umum PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Poperaturan presiden no 12 tahun 2006  5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Potri 51121 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 51121 Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI Fengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  51121 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunjangan-tunjangan ITNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Belanja Tunjangan Umum PNS	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Poperaturan presiden no 12 tahun 2006  Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji Pok/polri Belanja Gaji Pok/polri Belanja Gaji Pok/polri Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/Polri  Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/Polri  Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/Polri  Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/Polri  Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/Polri  Belanja Tunjangan-tunjangan untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/Polri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/Polri  Belanja Tunjangan Tunjangan anak TNI/Polri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/Polri  Belanja Tunjangan Tunjangan struktural TNI/Polri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/Polri  Belanja Tunjangan TNI/Polri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/Polri  Belanja Tunjangan TNI/Polri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/Polri  Belanja Tunjangan TNI/Polri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/Polri  Belanja Tunjangan TNI/Polri  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/Polri  Belanja Tunjangan TNI/Polri	
51121 Belanja Gaji TNI/POLRI 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI 511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI	olri sesuai
Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI  Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI  Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI  Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI  Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI  511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/Istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI  51122 Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI  511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
51122 Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI  511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/Istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI  Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  Belanja Tunj. Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI  511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI  511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI  511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI	
i de la companya de	
511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI	_
511227 Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI	

	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
3.1220	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik)
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan TNI/POLRI
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan TNI/POLRI  Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Polonio Tuni. Voucon/Dolucon TNII TNII/DOLDI
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI
511233	Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Babinsa TNI/POLRI
511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI
511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI
311233	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI
511236	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI
511237	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan brevet TNI/POLRI
511238	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
31.1200	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI
F44000	
511239	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keterampilan khususTNI/POLRI
	rengeluaran untuk pembayaran tunjangan keterampilan khusus (Ni/F OLK)
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan MedisTNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan wedis mirrotki
511242	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI
511243	Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
311244	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNI/POLRI sesuai peraturan presiden no 12
	tahun 2006
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51131	Belanja Gaji Pejabat Negara
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara  Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok pejabat negara
	генустиаган иник рентрауаган уад рокок рејарат неуага
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok pejabat negara
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri pejabat negara
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara

	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak pejabat negara
F11000	Delegio Turi: Chryldwyd Deighod Neggro
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural pejabat negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sirukturai pejabat negara
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh pejabat negara
F1120F	Delay's Toy's Days Delahat Names
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara  Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras pejabat negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras pejabat negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan komunikasi intensif pejabat negara
511332	Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara
311332	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang kehematan pejabat negara
	- Ongotalan antan pomba jaran tanjangan aang tomatan pojabat nogata
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan paket harian pejabat negara
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
271301	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara
511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
0.1000	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat negara
511337	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara
5114	Belanja Pegawai Perjan
51141	Belanja Pegawai Perjan
511411	Belanja Pegawai Perjan
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok pegawai perjan
511412	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pegawai Perjan
011112	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pegawai perjan
511419	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok pegawai perjan
5115	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51151	Pengembalian Belanja Gaji PNS
511511	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS
E11F10	Merupakan kontra pos dari Belanja Gaji Pokok PNS (Mata Anggaran 511111)
511519	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS  Morunakan kontra pos dari Bolanja Pombulatan Gaji PNS (Mata Anggaran 511110)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembulatan Gaji PNS (Mata Anggaran 511119)
51152	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511521	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Mata Anggaran 511121)
511522	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Anak PNS (Mata Anggaran 511122)
511523	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Struktural PNS (Mata Anggaran 511123)
511524	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Fungsional PNS (Mata Anggaran 511124)

511525	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. PPh PNS (Mata Anggaran 511125)
511526	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Beras PNS (Mata Anggaran 511126)
511527	Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kemahalan PNS (Mata Anggaran 511127)
511528	Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lauk pauk PNS (Mata Anggaran 511128)
511529	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS
311329	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Makan PNS (Mata Anggaran 511129)
	Werupakan kunta pus dan belanja dang wakan FNS (wata Anggalan 311127)
51153	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511531	Pengembalian Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS (Mata Anggaran 511131)
F11F22	Donas de l'ac Dalacia Tari Casa de DNC
511532	Pengembalian Belanja Tunj. Cacat PNS  Marunakan kantra nas dari Palanja Tunj. Cacat PNS (Mata Anggaran F11122)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Cacat PNS (Mata Anggaran 511132)
511533	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS (Mata Anggaran 511133)
511534	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS (Mata Anggaran 511134)
511535	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
311333	r engembalian belanja ranj. Baeran responeli sangat responeli 1145
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS (Mata Anggaran 511135)
F11F2/	Donorsky Har Dalasia Tari Warratia as DNC
511536	Pengembalian Belanja Tunj. Kewanitaan PNS  Marunakan kantra nas dari Palanja Tunj. Kewanitaan PNS (Mata Anggaran F11124)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kewanitaan PNS (Mata Anggaran 511136)
511537	Pengembalian Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS (Mata
	Anggaran 511137)
F11F20	Dengambalian Dalania Tuni. Tugaa Dalaiar Tanaga Dangaiar Diaga nada DT untuk mangilusti nandidikan Dagaa Cariana
511538	Pengembalian Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca
	Sarjana PNS (Mata Anggaran 511138)
F11F20	Donasahalian Dalasia Tarianan Massa Daras DNC
511539	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS  Manusakan kanta nga dari Pakaria Tunjangan Khusus Papua PNS (Mata Angaran 511130)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS (Mata Anggaran 511139)
51154	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri)
511541	Pengembalian Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di Luar Negeri)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511141)
E445.0	
511542	Pengembalian Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di Luar Negeri)  Marupakan kantra pas dari Palanja Tunj. Pestitusi Pengabatan PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran F11142)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511142)
511543	Pengembalian Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di Luar Negeri)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511143)
511544	Pengembalian Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di Luar Negeri)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511144)
F44F4F	Degree the line Delevie Tord Degree the second seco
511545	Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di Luar Negeri)  Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Pengnidupan Luar Negeri untuk Home Stali. PNS (Stali di LN) (Mata Anggaran 511145)
	<u>'</u>
511546	Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511146)
511547	Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri (Mata Anggaran 511147)
511548	Pengembalian Belanja Lokal Staff Lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Lokal Staff Lainnya (Mata Anggaran 511148)
51155	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
511551	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS  Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Umum PNS (Mata Anggaran 511151)
5116	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51161	Pengembalian Belanja Gaji TNI/Polri
511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok TNI/Polri  Merupakan kontra pos dari Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (Mata Anggaran 511211)
511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (Mata Anggaran 511219)
51162	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/Polri
511621	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (Mata Anggaran 511221)
511622	Pengembalian Belanja Tunj. Anak TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (Mata Anggaran 511222)
511623	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (Mata Anggaran 511223)
511624	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri  Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI (Mata Anggaran 511224)
511625	Pengembalian Belanja Tunj. PPh TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (Mata Anggaran 511225)
511626	Pengembalian Belanja Tunj. Beras TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI (Mata Anggaran 511226)
511627	Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI (Mata Anggaran 511227)
511628	Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri  Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI (Mata Anggaran 511228)
	merupakan kontra pos dan belanja Tunj. Lauk pauk Tivir OLKI (iviata Anggaran 311220)
511629	Pengembalian Belanja Uang Makan TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Makan TNI/POLRI (Mata Anggaran 511229)
51163	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/Polri
511631	Pengembalian Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI (Mata Anggaran 511231)
511632	Pengembalian Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/Polri Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (Mata Anggaran 511232)
511633	Pengembalian Belanja Tunj. Babinsa TNI/Polri  Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI (Mata Anggaran 511233)
511634	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/Polri  Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI (Mata Anggaran 511234)
E11/2F	
511635	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/Polri

	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI (Mata Anggaran 511235)
511636	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
311030	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI (Mata Anggaran 511236)
	Werupakan kuntra pus dan belanja Tunj. Kumpensasi Kerja bidang Persandian PNS TNIP OEKI (Wata Anggaran 311230)
511637	Pengembalian Belanja Tunj. Brevet TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI (Mata Anggaran 511237)
511638	Pengembalian Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI (Mata Anggaran 511238)
511639	Pengembalian Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI (Mata Anggaran 511239)
51164	Dengambalian Palaria Tuniangan tuniangan III TNI/DOLDI
51164 511641	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI Pengembalian Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
311041	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI (Mata Anggaran 511241)
	Werdpakan kontra pos dan belanja runjangan wedis 114/1 OERI (wata Anggaran 311241)
511642	Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI (Mata Anggaran 511242)
511643	Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri (Mata Anggaran 511243)
511644	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (Mata Anggaran 511244)
5117	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
5117	Pengembalian Belanja Gaji Pejabat Negara
511711	Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
311711	Merupakan kontra pos dari Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara (Mata Anggaran 511311)
	Morapakan kontra pas dan zeranja daji i okok i sjabat Nogara (Mata / Inggaran o 1707)
511719	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara (Mata Anggaran 511319)
51172	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511721	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara (Mata Anggaran 511321)
511722	Pengembalian Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara
311722	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara (Mata Anggaran 511322)
	Werdparkan Kontra pos dan Belanja Panj. Pinak Pejabat Negara (Wata Pinggaran 9 17522)
511723	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara (Mata Anggaran 511323)
511724	Pengembalian Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara (Mata Anggaran 511324)
511725	Pengembalian Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara (Mata Anggaran 511325)
51173	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
51173	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan in Pejabat Negara  Pengembalian Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
011/01	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara (Mata Anggaran 511331)
	apanan nome poo aan oolarja Tariji Nomanikasi intorisii Eojabat Progara (Mata Aligyaran 0 1 1001)
511732	Pengembalian Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara (Mata Anggaran 511332)
511733	Pengembalian Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara (Mata Anggaran 511333)
F11704	Department of the Delay of December 1997 Marketon December 1997 Mark
511734	Pengembalian Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara  Merunakan kentra padati Pelanja Pentuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara (Meta Anggaran F11334)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara (Mata Anggaran 511334)

511735	Pengembalian Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Merupakan kontra pos dari Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara (Mata Anggaran 511335)
511736	Pengembalian Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara (Mata Anggaran 511336)
511737	Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara
311/3/	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara (Mata Anggaran 511337)
	morapatan tonia poo aan bolanja ranji ban toniasak aang aata rojabat rogara (mata ringgaran o riso r)
5118	Pengembalian Belanja Pegawai Perjan
51181	Pengembalian Belanja Pegawai Perjan
511811	Pengembalian Belanja Pegawai Perjan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pegawai Perjan (Mata Anggaran 511411)
511812	Pengembalian Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka
311012	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pegawai Perjan (Mata Anggaran 511412)
	Wordparker roman pos dan bolanja ranj. Edir lain tormasak dang daka r ogawar roman (wata ringgaran o r r r 2)
511819	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan (Mata Anggaran 511419)
5119	Belanja Gaji Dokter PTT
<b>51191</b> 511911	Belanja Gaji Dokter PTT  Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
311711	Pengeluaran untuk pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT
	1 Crigeralari untuk pembayaran gaji bokter dan bidari i 11
511912	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
511913	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
511914	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
011711	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT
51192	Pengembalian Belanja Gaji Dokter PTT
511921	Pengembalian Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	Merupakan kontra pos dari Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT (Mata Anggaran 511911)
511922	Pengembalian Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
011722	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT (Mata Anggaran 511912)
511923	Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT (Mata Anggaran 511913)
E11004	Dengambalian Dalania Tuniangan Daktar dan Didan DTT
511924	Pengembalian Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT  Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT (Mata Anggaran 511914)
	Weitupakan kontra pos dan beranja Tunjangan bokter dan bidan 111 (Wata Anggaran 311714)
512	Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
5121	Belanja Honorarium
51211	Belanja Honorarium
512111	Belanja Uang Honor Tetap
	Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tetap
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap
JIZIIZ	Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tidak tetap
	1 ongoladi di dikak pombayaran monoranan daak totap
5122	Belanja Lembur
51221	Belanja Lembur
512211	Belanja uang lembur
	Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur.
5123	Belanja Vakasi
J123	Delatifa variasi

51231	Belanja Vakasi
51231	Belanja Vakasi
312311	·
	Pengeluaran untuk pembayaran vakasi.
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
312411	
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/tunjangan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Belanja Pegawai Transito
	Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
5125	Pengembalian Belanja Honorarium
51251	Pengembalian Belanja Honorarium
512511	Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Honor Tetap (Mata Anggaran 512111)
512512	Pengembalian Belanja Uang Honor Tidak Tetap
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Mata Anggaran 512112)
5126	Pengembalian Belanja Lembur
51261	Pengembalian Belanja Lembur
512611	Pengembalian Belanja uang lembur
	Merupakan kontra pos dari Belanja uang lembur (Mata Anggaran 512211)
5127	Pengembalian Belanja Vakasi
51271	Pengembalian Belanja Vakasi
512711	Pengembalian Belanja Vakasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Vakasi (Mata Anggaran 512311)
F100	December 11 and Delevit Test 17 because A Delevit December 17 because 17 beca
5128	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51281	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512811	Pengembalian Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
	Merupakan kontra pos dari Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) (Mata Anggaran 512411)
512812	Pengembalian Belanja Pegawai Transito
312012	Merupakan kontra pos dari Belanja Pegawai Transito (Mata Anggaran 512412)
	Weldpakan kontra pos dan belanja r egawai mansito (wata Anggaran 312412)
513	Belanja Kontribusi Sosial
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS  Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
313111	1 , 0 00
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513112	Rolania Donciun dan Hang Tunggu Dojahat Magara
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi pejabat negara yang mengajukan pensiun dipercepat
	atau memilih menjadi anggota partai politik.
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
010110	1
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS TNI/ Dephan yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau
	memilih menjadi anggota partai politik.
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.

513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau
	memilih menjadi anggota partai politik.
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
51313	Belanja Tunjangan Hari Tua
513131	Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability
	Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability ( kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
5132	Belanja Asuransi Kesehatan
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
51321	Belanja Askes PNS  Belanja Askes PNS
313211	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes PNS
	Digunakan antak pembayaran belanja 7 skes 1 110
513212	Belanja Askes Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun
010221	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Penerima Pensiun
51323	Belanja Askes TNI/Dephan
513231	Belanja Askes TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/Dephan
51324	Belanja Askes Polri
513241	Belanja Askes Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri
51325	Belanja Askes Veteran
513251	Belanja Askes Veteran
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Veteran
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
	Digunakan untuk pembayaran belanja tunjangan kesehatan veteran non tuvet
5134	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51341	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513411	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS (Mata Anggaran 513111)
513412	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
010712	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara (Mata Anggaran 513112)
513413	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan (Mata Anggaran 513113)
E10414	Develophelier Delegie Dereion der Henr Turren DNC Date
513414	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri  Merupakan kentra pas dari Pelapia Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri (Meta Anggeren F13114)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri (Mata Anggaran 513114)
51342	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513421	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
J.J.E1	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama) (Mata Anggaran 513121)
513422	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan (Mata Anggaran 513122)
E12422	Dongombolian Polonia Dongiun dan Hang Tunggu Polri
513423	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri

	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri (Mata Anggaran 513123)
51343	Pengembalian Belanja Tunjangan Hari Tua
513431	Pengembalian Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability
313431	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability (513131)
5135	Pengembalian Belanja Asuransi Kesehatan
51351	Pengembalian Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513511	Pengembalian Belanja Askes PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes PNS (Mata Anggaran 513211)
513512	Pengembalian Belanja Askes Pejabat Negara Merupakan kontra pos dari Belanja Askes Pejabat Negara (Mata Anggaran 513212)
51352	Pengembalian Belanja Askes Penerima Pensiun
513521	Pengembalian Belanja Askes Penerima Pensiun
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes Penerima Pensiun (Mata Anggaran 513221)
51353	Pengembalian Belanja Askes TNI/Dephan
513531	Pengembalian Belanja Askes TNI/Dephan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes TNI/Dephan (Mata Anggaran 513231)
51354	Pengembalian Belanja Askes Polri
513541	Pengembalian Belanja Askes Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes Polri (Mata Anggaran 513241)
51355	Pengembalian Belanja Askes Veteran
513551	Pengembalian Belanja Askes Veteran
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes Veteran (Mata Anggaran 513251)
5136	Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51361	Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513611	Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet (Mata Anggaran 513311)
52	Belanja Barang
521	Belanja Barang
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran
	Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang TUPOKSI Kementerian negara/ lembaga terdiri dari :
	- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, pengiriman surat/kawat, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tam
	- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya Satpam/pengaman kantor, biaya sewa gedung, telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB
521112	Belanja Inventaris Kantor
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker.
521113	Belanja pengadaan bahan makanan
-	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional seperti pengadaan bahan makanan yang diberikan antara lain kepada narapidana, tahanan kejaksaan, tahanan imigrasi, pasien rumah sakit, anak asuhan (panti) tuna sosial, mahasiswa penerbang,
521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual)
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang untuk pelaksanaan TUPOKSI yang bersifat kontraktual
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang untuk tujuan operasional yang tidak termasuk dalam Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Inventaris Kantor, pengadaan bahan makanan dan barang untuk pelaksanaan TUPOKSI yang bersifat kontraktual

5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
521211	Belanja Bahan
	Digunakan untuk pengeluaran biaya memperoleh bahan (yang habis dipakai) yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pengadaan bahan makanan untuk keperluan dies natalis, pameran, pelantikan pejabat, sosialisasi,rapat
521212	Belanja Barang Transito
521213	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada kantor-kantor (UPT) di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.  Belanja Barang Perjan
321213	
521219	Digunakan untuk pengeluaran belanja barang pada kantor-kantor yang berubah status menjadi Perusahan Jawatan (seperti Perjan TVRI dan RRI)  Belanja Barang Non Operasional Lainnya
321219	Digunakan untuk pengeluaran biaya-biaya Crash Program.
	Diganakan antak pengelaaran biaya biaya erasin regiam.
5213	Pengembalian Belanja Barang Operasional
52131	Pengembalian Belanja Barang Operasional
521311	Pengembalian Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran
	Merupakan kontra pos dari Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Mata Anggaran 521111)
521312	Pengembalian Belanja Inventaris Kantor
021012	Merupakan kontra pos dari Belanja Inventaris Kantor (Mata Anggaran 521112)
	35
521313	Pengembalian Belanja pengadaan bahan makanan
	Merupakan kontra pos dari Belanja pengadaan bahan makanan (Mata Anggaran 521113)
E01014	Dangambalian Dalania Darang untuk Dalaksanaan TUDOVSI (barsifat kantraktual)
521314	Pengembalian Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual)  Merupakan kontra pos dari Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual) (Mata Anggaran 521114)
	incrupakan kontra pos dan belanja barang untuk i elaksanaan 101 OKSI (belsirat kontraktual) (wata Anggaran 521114)
521319	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Barang Operasional Lainnya (Mata Anggaran 521119)
5214	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional
52141 521411	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Pengembalian Belanja Bahan
321411	Merupakan kontra pos dari Belanja Bahan (Mata Anggaran 521211)
	33
521412	Pengembalian Belanja Barang Transito
	Merupakan kontra pos dari Belanja Barang Transito (Mata Anggaran 521212)
E01/10	Dongombolion Polonio Porong Porion
521413	Pengembalian Belanja Barang Perjan  Merupakan kontra pos dari Belanja Barang Perjan (Mata Anggaran 521213)
	Wordpakan Kontra pos dan Bolanja Barang Forjan (Mata Anggaran 321213)
521419	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Mata Anggaran 521219)
F00	
522	Belanja Jasa
5221 52211	Belanja Jasa Belanja Jasa
52211	Belanja Langganan daya dan jasa
	Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, dan gas
	Marie and the second se
522112	Belanja Jasa pos dan giro
	Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia
522113	Belanja Pengeluaran bebas porto
	Digunakan untuk pembayaran pengiriman surat dinas bagi instansi Pemerintah yang dana pengirimannya tidak dialokasikan
	dalam DIPA atau dokumen yang dipersamakan
522114	Belanja Pembiayaan surveyor
	Digunakan untuk pembayaran surveyor
522115	Belanja Jasa Konsultan
	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan termasuk jasa pengacara

522116	Belanja Sewa
	Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor atau sewa lainnya)
	Digundadir untuk perindagaran sewa (misain)a sewa kanter atau sewa tahunya)
522119	Belanja Jasa Lainnya
	Digunakan untuk pembayaran pekerjaan yang bersifat non fisik lainnya (jasa lainnya)
5222	Pengembalian Belanja Jasa
52221	Pengembalian Belanja Jasa
522211	Pengembalian Belanja Langganan daya dan jasa
	Merupakan kontra pos dari Belanja Langganan daya dan jasa (Mata Anggaran 522111)
522212	Pengembalian Belanja Jasa pos dan giro
	Merupakan kontra pos dari Belanja Jasa pos dan giro (Mata Anggaran 522112)
522213	Pengembalian Belanja Pengeluaran bebas porto
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran bebas porto (Mata Anggaran 522113)
500011	
522214	Pengembalian Belanja Pembiayaan surveyor
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembiayaan surveyor (Mata Anggaran 522114)
F2221F	Department on Delarie Jose Keneulten
522215	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan  Merupakan kontra pos dari Belanja Jasa Konsultan (Mata Anggaran 522115)
	i vici upakari kuriti a pus uari betarija Jasa kurisultari (iviata Ariyydi'dii 322113)
522216	Pengembalian Belanja Sewa
322210	Merupakan kontra pos dari Belanja Sewa (Mata Anggaran 522116)
	Werdpakan kentra pes dan belanja sewa (wata Anggaran sez 116)
522219	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya
OZZZ 17	Merupakan kontra pos dari Belanja Jasa Lainnya (Mata Anggaran 522119)
	Indiapanan noma poo aan zolarja caca zaminja (mala miggaran ezz mi)
523	Belanja Pemeliharaan
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari 10% (termasuk cleaning service) dan pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi semula, serta tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset
523112	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non departemen/Tni/Polri/asrama yang terdapat di semua Departemen/Lembaga Non Departemen, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman pagar agara dalam kondisi normal.
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal
523122	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
32	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin yang tidak tertampung dalam pos
	biaya pemeliharaanperalatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal
E22122	Polonia Piava Domoliharaan Irigasi
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal
E22122	Polonia Diava Demoliharaan Jaringan
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal
	<u>l</u>

E0014	Delayie Disco Demelihansan Lainnus
52314	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523149	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan,bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memilki nilai sejarah
5232	Pengembalian Belanja Pemeliharaan
52321	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523211	
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Mata Anggaran 523111)
523212	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
323212	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (Mata Anggaran 523112)
	Wellupakan kuntra pus uam belanja biaya Femelinaraan Geuung uan bangunan Lainnya (wata Anggaran 525 112)
52322	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523221	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
323221	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Mata Anggaran 523121)
	Weldpakari kullua pus dari belanja biaya Femelinaraan Feralatan dari Wesin (Wata Anggaran 525121)
523222	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
020222	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mata Anggaran 523122)
	morapanan nomia pos dan bolanja biaja i omolinardan i oralatan dan wesin Lalinnya (wata miggaran 525122)
52323	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523231	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
020201	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mata Anggaran 523131)
	The apartal Francisco Carl Delarge English Content and Content a
523232	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi (Mata Anggaran 523132)
	3. (
523233	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan (Mata Anggaran 523133)
52324	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523249	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya (Mata Anggaran 523149)
524	Belanja Perjalanan
5241	Belanja Perjalanan
52411	Belanja Perjalanan
524111	Belanja perjalanan biasa
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan TUPOKSI kementerian negara/lembaga seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan
524112	Belanja perjalanan tetap
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan
	perjalanan dinas .
524119	Belanja perjalanan lainnya
	Pengeluaran untuk perjalanan lainnya yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain
	antara lain biaya perjalanan mutasi pensiun, pengiriman jenazah
5242	Pengembalian Belanja Perjalanan
52421	Pengembalian Belanja Perjalanan
524211	Pengembalian Belanja perjalanan biasa
	Merupakan kontra pos dari Belanja perjalanan biasa (Mata Anggaran 524111)
E0 1012	
524212	Pengembalian Belanja perjalanan tetap
	Merupakan kontra pos dari Belanja perjalanan tetap (Mata Anggaran 524112)
E0.4040	December 1 on Delay 1 on white and below
524219	Pengembalian Belanja perjalanan lainnya  Marunakan kantun nan dari Bakaria perjalanan lainnya (Mata Anggaran 534110)
	Merupakan kontra pos dari Belanja perjalanan lainnya (Mata Anggaran 524119)
EO	Polonio Model
53	Belanja Modal

531	Belanja Modal Tanah
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat
	administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai.
5312	Pengembalian Belanja Modal Tanah
53121	Pengembalian Belanja Modal Tanah
531211	Pengembalian Belanja Modal Tanah
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Tanah (Mata Anggaran 531111)
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
552111	
	Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi peralatan dan mesin
5322	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53221	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532211	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Mata Anggaran 532111)
F00	Polosis Madd Codos a dos Possosos
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
5332	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53321	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533211	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Mata Anggaran 533111)
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan dan jembatan.
534112	Belanja Modal Irigasi
001112	
	Pengeluaran untuk memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi irigasi.
534113	Belanja Modal Jaringan
•	Pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya
	lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jaringan.
5342	Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53421	Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
534211	Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan
00 12 1 1	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan (Mata Anggaran 534111)
534212	Pengembalian Belanja Modal Irigasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Irigasi (Mata Anggaran 534112)

534213	Pengembalian Belanja Modal Jaringan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Jaringan (Mata Anggaran 534113)
535	Belanja Modal Fisik Lainnya
5351	Belanja Modal Fisik Lainnya
53511	Belanja Modal Fisik Lainnya
535111	Belanja Modal Fisik Lainnya
	Pengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian , barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal ilmiah.
5352	Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya
53521	Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya  Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya
53521	Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya  Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya
333211	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Fisik Lainnya (Mata Anggaran 535111)
	Wellupakan kontra pos dan belanja Wodai Fisik Lainnya (Wata Anggaran 555111)
54	Belanja Pembayaran Bunga Utang
541	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek
54111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan
011111	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Surat Utang perbendaharaan dalam negeri dan Surat
	Berharga lainnya
541119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Perbendaharaan
	Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga utang dalam negeri
	Digutakan antak pengelaaran kewajiban pemerintan aininya terhadap banga atang dalam negeri
54112	Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
541121	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan
	pajak (restitusi)
541122	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Pendek
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas pinjaman perbankan
541123	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai.
541129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
J41127	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
	Digunakan untuk pembayaran biayarkewajiban lainnya - bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
5412	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek
54121	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan
541211	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan
2	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan (Mata Anggaran 541111)
	morapanan noma poo aan zolanja i omaajaran zanga oarat olang i olasia araan (mata i anggaran o i i i i i)
541219	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Perbendaharaan Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Perbendaharaan (Mata Anggaran 541119)
54122	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
541221	Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB)
JHIZZI	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) (Mata Anggaran 541121)
541222	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Pendek
J41ZZZ	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Pendek (Mata Anggaran 541122)
	i werupakan kunta pus uan belanja rembayaran bunga rinjaman remankan - Jangka renuek (wata Angyafan 541122)
541223	Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
UTIZZJ	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) (Mata Anggaran

Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah Digunakan untuk pembayaran beban bunga Obligasi Dalam Negeri yang harus dibayar oleh pemerintah Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara  Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara — Rupiah Digunakan untuk pembayaran beban bunga Obligasi Dalam Negeri yang harus dibayar oleh pemerintah Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara  Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan  Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Digunakan untuk pembayaran beban bunga Obligasi Dalam Negeri yang harus dibayar oleh pemerintah  Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara  Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara  Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya  Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang  Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan  Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara  Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan  Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara  Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang  Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan  Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan  Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Digunakan untuk nangakuaran rutin nambayaran biaya/kayailban Dynasa Obligasi Nanga Islamas
Digunakan untuk pengeluaran rutin pembayaran biaya/kewajiban Bunga Obligasi Negara lainnya
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah (Mata Anggaran 541311)
Dengembelian Delania Dembeyaran Diaya/kewajihan lainnya Dunga Ohligasi Negara
Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara  Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara (Mata Anggaran 541319)
Morapakan konta pos dan Bolanja i embayaran Biayarkenajiban laininya Banga Obligasi Negara (Mata Anggaran O 17017)
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang
Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang (Mata Anggaran 541321)
Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya (Mata Anggaran 541329)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Negara
Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan – Valas
Digunakan untuk pembayaran beban bunga Surat Utang Perbendaharaan dalam bentuk valas yang harus dibayar oleh pemerintah
Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Negara
Digunakan untuk pengeluaran rutin pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Negara
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan – Valas
Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan – Valas (Mata Anggaran 542111)
Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Negara
Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Negara (Mata Anggaran 542119)
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang
Belanja Bunga Pinjaman program
Belanja Bunga Pinjaman Program
Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.

542321	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
	prijaman program
542329	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek
54233	Belanja Bunga Obligasi Negara
542331	Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas  Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Obligasi pemerintah dalam bentuk valas
542339	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya dan bunga Obligasi negara yang harus dibayar oleh pemerintah
54234	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
542341	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
542342	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
542349	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadualan kembali pinjaman
5424	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang
54241	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman program
542411	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Pinjaman Program (Mata Anggaran 542311)
542419	Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program (Mata Anggaran 542319)
54242	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman proyek
542421	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 542321)
542429	Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 542329)
54243	Pengembalian Belanja Bunga Obligasi Negara
542431	Pengembalian Biaya Obligasi Negara – Valas
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas (Mata Anggaran 542331)
542439	Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara (Mata Anggaran 542339)
54244	Pengembalian Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
542441	Pengembalian Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program (Mata Anggaran 542341)
542442	Pengembalian Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 542342)
542449	Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman (Mata Anggaran 542349)
543	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54311	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
543111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri  Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan surat utang perbendaharaan Negara Dalam Negeri.
	Digunakan untuk pembayaran disebunt yang dibenkan atas penerbitah surat utang perbendaharah Negara Dalah Negen.

543119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
F4040	Palaria Parata and Pianara Oldina i Nasara Palara Nasari
<b>54312</b> 543121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
343121	Digunakan untuk pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digutakan antak pembagaian bisodan obilgasi nogara balam nogen
543129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
5432	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
<b>54321</b> 543211	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
343211	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri (Mata Anggaran 543111)
543219	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri (Mata Anggaran 543119)
54322	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
543221	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
0.022.	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri (Mata Anggaran 543121)
543229	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri (Mata Anggaran 543129)
544	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
5441	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54411	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
544111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
544119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
344117	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	2 - ganaran antan pembaganan 2 lagamenajaan tahunga 2 lebelah etahunga 1 etahungan 1 etahu
54412	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
344129	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Digutakan antak pembagaran biayakewajiban tahinya. Diseban Obligasi Negara Laar Negeri
5442	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54421	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
544211	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 544111)
544219	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
U. 1217	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar
	Negeri (Mata Anggaran 544119)
54422	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544221	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri  Marunakan kentra pas dari Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 544121)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 544121)
544229	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 544129)
545	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption
UTU	Dolanja i ombayaran 2000 on Dona Neachiption

E 4 E 4	Delevis Dende construction on Dend Dedenotion at a Dende Pen Manual Obligation (Delevis Delevis Name)
5451	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri
54511	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri
545111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang  Digunakan untuk pembayaran biaya yang terjadi dari perbedaan antara nominal dan clean price karena pemerintah membeli kembali SUN ( cash buy back) pada harga premium (di atas par)
5455	Pengembalian Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri
54551	Pengembalian Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri
545511	Pengembalian Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka
	Panjang  Merupakan Kontra pos dari Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang (545111)
55	Belanja Subsidi
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Negara
	Digunakan untuk pembayaran subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR
5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM
55121	Belanja Subsidi BBM
551211	Belanja Subsidi Avgas
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Belanja Subsidi Avtur
331212	
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Belanja Subsidi Premium
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Dolonio Cubcidi Minyok Dokor
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM
55131	Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya
551311	Belanja Subsidi pangan
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK (Rp. 1.000,00) dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Belanja Subsidi listrik
551512	Digunakan untuk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero
551313	Belanja Subsidi benih
001010	,
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.

551314	Belanja Subsidi obat
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
FF101F	Delivery Collectiff and a
551315	Belanja Subsidi gula  Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Polonio Subcidi nunuk
331310	Belanja Subsidi pupuk  Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551319	Belanja Subsidi harga/biaya lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih,subsidi pangan dan subsidi listrik.
55132	Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit
551321	Belanja Subsidi Bunga KUT
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT)
551322	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi
551323	Belanja Subsidi Bunga KOP
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop)
FF1224	Debate Celesti Dance KOD DDIM
551324	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM  Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
551325	Belanja Subsidi Bunga KPR
001020	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana
551326	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
331320	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
551329	Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya
331327	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.
55133	Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak
551331	Belanja Subsidi PPh
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551332	Belanja Subsidi PPN
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551333	Belanja Subsidi BM
331333	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
55134	Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya
551341	Belanja Subsidi haji
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551342	Belanja Subsidi kendaraan bermotor
	1 25

	Digunakan untuk pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA,
	BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551349	Belanja Subsidi lainnya Digunakan untuk pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO
55141	Belanja Subsidi dalam rangka PSO
551411	Belanja Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Belanja Subsidi PT PELNI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI
551413	Belanja Subsidi PT Pos dan Giro
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indoesia
551414	Belanja Subsidi TVRI
001111	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada TVRI
551415	Belanja Subsidi BULOG Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada BULOG
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada BoLOG
551419	Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya
5515	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55151	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551511	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Negara (Mata Anggaran 551111)
5516	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM
55161	Pengembalian Belanja Subsidi BBM
551611	Pengembalian Belanja Subsidi Avgas
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Avgas (Mata Anggaran 551211)
551612	Pengembalian Belanja Subsidi Avtur
331012	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Avtur (Mata Anggaran 551212)
551613	Pengembalian Belanja Subsidi Premium
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Premium (Mata Anggaran 551213)
551614	Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Bakar
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Minyak Bakar (Mata Anggaran 551214)
554/45	
551615	Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Solar  Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Minyak Solar (Mata Anggaran 551215)
	Werdpakan kentra pes dan belanja Subsidi Winiyak Selai (Wata Anggaran 331213)
551616	Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Diesel
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Minyak Diesel (Mata Anggaran 551216)
551617	Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Tanah
331017	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Minyak Tanah (Mata Anggaran 551217)
5517	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM  Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya
<b>55171</b> 551711	Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya  Pengembalian Belanja Subsidi pangan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi pangan (Mata Anggaran 551311)
EE4740	
551712	Pengembalian Belanja Subsidi listrik  Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi listrik (Mata Anggaran 551312)
	i vierupakan kunna pus uan belanja subsidi listrik (iviata Anggaran 331312)
551713	Pengembalian Belanja Subsidi benih
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi benih (Mata Anggaran 551313)

FF1711	Dengambalian Dalania Cubaidi abat
551714	Pengembalian Belanja Subsidi obat
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi obat (Mata Anggaran 551314)
FF474F	
551715	Pengembalian Belanja Subsidi gula
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi gula (Mata Anggaran 551315)
551716	Pengembalian Belanja Subsidi pupuk
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi pupuk (Mata Anggaran 551316)
551719	Pengembalian Belanja Subsidi harga/biaya lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi harga/biaya lainnya (Mata Anggaran 551319)
55172	Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit
551721	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KUT
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KUT (Mata Anggaran 551321)
	Wordparker Roma pos dan Bolarja odbola Banga Rom (Maka miggaran oo 102 1)
551722	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
331722	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KOP PIR (Mata Anggaran 551322)
	iworupakan kontra pos dan bolanja subsidi bunga KOF FIIK (iwata Anggaran 331322)
EE1700	Dongombalian Polania Subcidi Punga VOD
551723	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KOP (Mata Anggaran 551323)
FF470:	D. T. B. L. C. L. II. B. WOD DOU'T
551724	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM (Mata Anggaran 551324)
551725	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KPR
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KPR (Mata Anggaran 551325)
551726	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (Mata Anggaran 551326)
551729	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya (Mata Anggaran 551329)
55173	Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak
551731	Pengembalian Belanja Subsidi PPh
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PPh (Mata Anggaran 551331)
	35 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
551732	Pengembalian Belanja Subsidi PPN
001702	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PPN (Mata Anggaran 551332)
	Werdpakan kenta pes dan belanja sabsian i i ik (wata ringgaran 557552)
551733	Pengembalian Belanja Subsidi BM
001/00	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi BM (Mata Anggaran 551333)
	werupakan kunta pus uan belanja subsidi bivi (wata Angyaran 55 1555)
55174	Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya
551741	Pengembalian Belanja Subsidi haji
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi haji (Mata Anggaran 551341)
FE45.5	
551742	Pengembalian Belanja Subsidi kendaraan bermotor
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi kendaraan bermotor (Mata Anggaran 551342)
551749	Pengembalian Belanja Subsidi lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi lainnya (Mata Anggaran 551349)
5518	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO
55181	Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSO
551811	Pengembalian Belanja Subsidi PT KAI
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PT KAI (Mata Anggaran 551411)
551812	Pengembalian Belanja Subsidi PT PELNI
-3.3.2	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PT PELNI (Mata Anggaran 551412)
	The second production of the second of the s
551813	Pengembalian Belanja Subsidi PT Pos dan Giro
ו ממומנו	

	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PT Pos dan Giro (Mata Anggaran 551413)
551814	Pengembalian Belanja Subsidi TVRI
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi TVRI (Mata Anggaran 551414)
551815	Pengembalian Belanja Subsidi BULOG
331013	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi BULOG (Mata Anggaran 551415)
	Wei upakan kontra pos dan belanja Subsidi Boleso (Wata Anggaran 331413)
551819	Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya (Mata Anggaran 551419)
552	Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga keuangan
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
55221	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Kedangan  Belanja Subsidi Lembaga Non Kedangan
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga non keuangan
	3
5523	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55231	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552311	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta (Mata Anggaran 552111)
5524	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
<b>55241</b> 552411	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
332411	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan (Mata Anggaran 552211)
	inici upakan kontra pos dan belanja Subsidi Lembaga Non Kedangan (inata Anggaran 552211)
56	Belanja Hibah
<b>56</b> 561	Belanja Hibah  Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611 56111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611 56111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611 56111 561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
561 5611 56111 561111 5612	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611 56111 561111 5612 5612	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611 56111 561111 5612	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611 56111 561111 5612 5612	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611 56111 561111 5612 5612	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)
561 5611 56111 561111 5612 5612 56121	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561 5611 56111 561111 5612 5612 56121 561211 562 562 5621 56211	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 5612 5612 56121 561211 562 562	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri  Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri  Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 5612 5612 56121 561211 562 562 5621 56211	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi
561 5611 56111 561111 5612 5612 56121 561211 562 562 5621 56211	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 56121 56121 561211 562 562 5621 56211 56211	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
561 5611 56111 561111 5612 5612 56121 562 562 5621 56211 56211	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 56121 56121 561211 562 5621 56211 562111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 5612 5612 56121 562 562 5621 56211 56211	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 56121 56121 561211 562 5621 56211 562111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 56121 56121 561211 562 5621 56211 562111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 56121 56121 56121 561211 562 5621 56211 562111 56221 56221	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 56121 56121 561211 562 5621 56211 562111 562211 563	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 56121 56121 561211 562 562 5621 56211 56211 56211 56211	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
561 5611 56111 561111 56121 5612 56121 561211 562 5621 56211 56211 56221 56221 5633 5631 56311	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
561 5611 56111 561111 56121 5612 56121 561211 562 5621 56211 56211 56221 56221 5633 5631 56311	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
561 5611 56111 561111 56121 56121 56121 561211 562 5621 56211 56211 56221 56221 56331 56311	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)  Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.  Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

E4221	Dangambalian Palania Hibah Kanada Damarintah Dangah
56321 542211	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563211	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah  Marunakan kentra padari Balanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Mata Anggaran 5 (2111))
	Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Mata Anggaran 563111)
F7	Delegie Destruction and id-
57	Belanja Bantuan sosial
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui
	kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
571	Belanja Bantuan kompensasi sosial
5711	Belanja Bantuan kompensasi sosial
57111	Belanja Bantuan kompensasi sosial
571111	Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi yang diberikan kepada masyarakat akibat kenaikan harga BBM
5712	Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial
57121	Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial
571211	Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM (Mata Anggaran 571111)
572	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan
5721	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572111	Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
•	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan langsung (Block Grant) sekolah/lembaga/guru
	2-3
572112	Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga
U, E112	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan imbal swadaya sekolah/lembaga
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan inibal swadaya sekolarinembaga
572113	Belanja Bantuan Beasiswa
372113	
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan beasiswa
5722	Rolania Rantuan Social Lombaga Doribadatan
57221	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan  Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57221	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan  Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
112210	,
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui
	kementerian negara/lembaga, guna meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan
5723	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57231	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan  Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572311	Pengembalian Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru (Mata Anggaran 572111)
572312	Pengembalian Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga (Mata Anggaran 572112)
572313	Pengembalian Belanja Bantuan Beasiswa
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan Beasiswa (Mata Anggaran 572113)
5724	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57241	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
572411	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan (Mata Anggaran 572211)
573	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57311	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran negara kepada lembaga sosial lainnya
	g
5732	Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57321	Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573211	Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya
0.0211	Merupakan kontra pos dari Belanja Lembaga Sosial Lainnya (Mata Anggaran 573119)
	inicrapakan kontra pos dan belanja Lembaga Sosiai Laininya (iviata Anggaran 973117)
EO	Polonia Lain Jain
58	Belanja Lain-lain

581	Belanja Lain-lain
5811	Belanja Lain-lain
	Digunakan untuk pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,belanja sosial dan dana cadangan umum.
58111	Belanja Lain-lain I
581111	Belanja Kerjasama Teknis Internasional
	Digunakan untuk pembayaran iuran-iuran keanggotaan RI dalam berbagai organisasi/ Badan Internasional.
581112	Belanja Pengeluaran Tak Tersangka
	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga dan tidak tertampung di dalam pos-pos pengeluaran yang lain.
581113	Belanja Cadangan Umum
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka membentuk dana cadangan umum
581114	Belanja Pemilu/oyalt tahunan
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan
581115	Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO
	Digunakan untuk pengeluaran atas kelebihan pajak/PE berdasar SKO
581116	Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
	Digunakan untuk pembayaran selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.
581118	Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
	Digunakan untuk pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga
581119	Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
	Digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat BA 69
58112	Belanja Lain-lain II
581121	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB sebesar 9 persen bagian biaya pemungutan dan disalurkan ke Rekening Kas Negara dan Kas daerah.
581122	Belanja KONI
	Bantuan Rutin kepada KONI Pusat dalam rangka tugas rutin KONI.
581123	Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda
	Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda .
581124	Belanja Non Modal-Otorita Batam
	Pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan otorita batam yang bersumber dari rupiah murni .
581129	Belanja lain-lain II lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya
58113	Belanja Rekonstruksi Aceh
581131	Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias
5812	Pengembalian Belanja Lain-lain
58121	Pengembalian Belanja Lain-lain I
581211	Pengembalian Belanja Kerjasama Teknis Internasional  Merupakan kontra pos dari Belanja Kerjasama Teknis Internasional (Mata Anggaran 581111)
F01010	
581212	Pengembalian Belanja Pengeluaran Tak Tersangka  Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Tak Tersangka (Mata Anggaran 581112)
	Thorapakan kontra pos aan bolanja i ongolaaran rak rorsangka (iviata Anggaran 501112)

581213	Pengembalian Belanja Cadangan Umum
301213	Merupakan kontra pos dari Belanja Cadangan Umum (Mata Anggaran 581113)
	Werdpakan kenta pes dan belanja eddangan eman (wata zinggaran berrito)
581214	Pengembalian Belanja Pemilu/sidang tahunan
00.2	Merupakan kontra pos dari Belanja Pemilu/oyalt tahunan (Mata Anggaran 581114)
	The special sp
581215	Pengembalian Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO (Mata Anggaran 581115)
581216	Pengembalian Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri (Mata Anggaran 581116)
581217	Pengembalian Belanja Cadangan dana reboisasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Cadangan dana reboisasi (Mata Anggaran 581117)
581218	Pengembalian Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga (Mata Anggaran 581118)
504040	
581219	Pengembalian Belanja lain-lain I lainnya  Magyarakan kanta ana dari Balanja Bana Cadangan Tanggan Bangat (Bana Kantijana) (Mata Angganan 501110)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) (Mata Anggaran 581119)
58122	Pengembalian Belanja Lain-lain II
58122	Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
301221	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP (Mata Anggaran 581121)
	Weitupakan kuntra pus dan belanja bagi nasii biaya/upan Fungut FBB untuk DJF (Wata Anggaran 301121)
581222	Pengembalian Belanja KONI
301222	Merupakan kontra pos dari Belanja KONI (Mata Anggaran 581122)
	Werdparker Renard pes dan Belanja Renar (Walta Alliggaran 66 1722)
581223	Pengembalian Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda (Mata Anggaran 581123)
581224	Pengembalian Belanja Non Modal-Otorita Batam
	Merupakan kontra pos dari Belanja Non Modal-Otorita Batam (Mata Anggaran 581124)
581229	Pengembalian Belanja Lain-lain II lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja lain-lain II lainnya (Mata Anggaran 581129)
58123	Belanja Rekonstruksi Aceh
581231	Pengembalian Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
	Kontra Pos dari Belanja Rekonstruksi Aceh (581131)
,	DEL ANDA HATTIK DAEDAH
6	BELANJA UNTUK DAERAH
/1	Semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
61	Belanja Dana Perimbangan
	semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana
	dimaksud dalam
	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
611	Belanja Dana Bagi Hasil
	Digunakan untuk pengeluaran negara yang dialokasikan kepada bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
	undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah
	atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam
	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
6111	Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan
61111	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan
611111	Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
/444.5	
611112	Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.

611113	Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi
011113	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan
	Propinsi.
611114	Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan
	Kabupaten/Kota.
61112	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611121	Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611122	Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611123	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
011123	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan
	disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611124	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan
	disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611125	Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada
	seluruh Kabupaten/Kota, yang pengalokasiannya didasarkan atas realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran Berjalan.
61113	Belanja Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
611131	Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611132	Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian daerah Kabupaten/Kota sebesar 64 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611133	Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota secara merata.
611134	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Biaya Perbaikan Administrasi Pertanahan.
/11125	Delaria DDI ITD Degian Demogratah Dugat utk biang Adm Dengit Del DDI ITD
611135	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB  Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Biaya Administrasi Peningkatan Pelayanan BPHTB.
611136	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Pemberian Imbalan Bunga.
6112	Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
61121	Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
611211	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.
611212	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil
27.212	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk
	Kabupaten/Kota penghasil.
611213	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
611213	

Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.  Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil	61122	Belanja Dana Bagi Hasil Gas Alam
Delanja Bagi hasil gas alam untuk Kab/Kota Penghasil Pengoburan yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.  Belanja Bagi hasil gas atam untuk Kab/Kota laranya Pengoburan yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota laranya dalam Proginsi penghasil.  Belanja Bagi hasil persumbangan Umum Belanja Bagi hasil uran telap untuk Proginsi Menyalutan bagi hasil uran telap untuk Proginsi Menyalutan bagi hasil uran telap untuk Kab/Kota Menyalutan bagi hasil royalit untuk Proginsi Menyalutan bagi hasil Royalit sebesar 16 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil Royalit sebesar 16 % kepada Proginsi penghasil  Menyalutan bagi hasil Royalit sebesar 16 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil Royalit sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil Royalit sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil Royalit sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Laimya dalam propinsi penghasil  Menyalutan bagi hasil HPH tentuk Kab/Kota laimya  Menyalutan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  Menyalutan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  Menyalutan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  Menyalutan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil PSDH untuk Kab/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalutan bagi h		
Peruguburan yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kola penghasal.  611223 Belanja Bagi hasil sasi asal mutuk Kabu/Kola lainnya Penghukana yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kola lainnya dalam Propinsi penghasil.  611231 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum  611231 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum  611231 Belanja Bagi hasil luran lelap untuk Propinsi  Menyalutkan bagi hasil luran Telap sebesar 16 56 kepada Propinsi penghasil  611232 Belanja Bagi hasil uran lelap untuk Kabu/Kola  Menyalutkan bagi hasil ruyaliy untuk Kabu/Kola  Menyalutkan bagi hasil Royalii sebesar 16 56 kepada Propinsi penghasil  611233 Belanja Bagi hasil ruyaliy untuk Kabu/Kola Penghasil  Menyalutkan bagi hasil Royalii sebesar 16 56 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611234 Belanja Bagi hasil Royalii sebesar 16 56 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611235 Belanja Bagi hasil Royalii sebesar 17 56 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611234 Belanja Bagi hasil Royalii sebesar 32 56 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611234 Belanja Bagi hasil Royalii sebesar 32 56 kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil  611234 Belanja Bagi hasil Hoyali sebesar 32 56 kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil  611244 Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi  Menyalutkan bagi hasil HIPH untuk Propinsi  Menyalutkan bagi hasil HIPH untuk Kabu/Kola Menyalutkan bagi hasil PSDH untuk Kabu/Kola Henghasil  611243 Belanja Bagi hasil HIPH sebesar 1658 kepada Propinsi penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kabu/Kola Henghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 3258 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611246 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 3258 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611247 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 3258 kepada Propinsi penghasil  611248 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 8058 secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611249 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 8058 secara merata kepada Pr		Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.
Peruguburan yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kola penghasal.  611223 Belanja Bagi hasil sasi asal mutuk Kabu/Kola lainnya Penghukana yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kola lainnya dalam Propinsi penghasil.  611231 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum  611231 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum  611231 Belanja Bagi hasil luran lelap untuk Propinsi  Menyalutkan bagi hasil luran Telap sebesar 16 56 kepada Propinsi penghasil  611232 Belanja Bagi hasil uran lelap untuk Kabu/Kola  Menyalutkan bagi hasil ruyaliy untuk Kabu/Kola  Menyalutkan bagi hasil Royalii sebesar 16 56 kepada Propinsi penghasil  611233 Belanja Bagi hasil ruyaliy untuk Kabu/Kola Penghasil  Menyalutkan bagi hasil Royalii sebesar 16 56 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611234 Belanja Bagi hasil Royalii sebesar 16 56 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611235 Belanja Bagi hasil Royalii sebesar 17 56 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611234 Belanja Bagi hasil Royalii sebesar 32 56 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611234 Belanja Bagi hasil Royalii sebesar 32 56 kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil  611234 Belanja Bagi hasil Hoyali sebesar 32 56 kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil  611244 Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi  Menyalutkan bagi hasil HIPH untuk Propinsi  Menyalutkan bagi hasil HIPH untuk Kabu/Kola Menyalutkan bagi hasil PSDH untuk Kabu/Kola Henghasil  611243 Belanja Bagi hasil HIPH sebesar 1658 kepada Propinsi penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kabu/Kola Henghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 3258 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611246 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 3258 kepada Kabupaten/Kola Penghasil  611247 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 3258 kepada Propinsi penghasil  611248 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 8058 secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611249 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 8058 secara merata kepada Pr	611222	Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil
Pengelutaran yang bersumber dari penerimaan SUA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penghasil.  611231 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum. 611231 Belanja Bagi hasil uran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil uran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil uran tetap untuk Kabu/Kota Menyalurkan bagi hasil royali untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil royali untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Royali sebesar 16 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611234 Belanja Bagi hasil royali yantuk Kabu/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royali sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royali sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royali sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611244 Belanja Bagi hasil Royali sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611245 Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kabu/Kota Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kabu/Kota Menyalurkan bagi hasil PPH untuk Kabu/Kota Penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PPH untuk Kabu/Kota Penghasil 611246 Belanja Bagi hasil PPH untuk Kabu/Kota Penghasil 611247 Belanja Bagi hasil PPH untuk Kabu/Kota Penghasil 611248 Belanja Bagi hasil PPH untuk Kabu/Kota Penghasil 611249 Belanja Bagi hasil PPH untuk Kabu/Kota Penghasil 611250 Belanja Bagi hasil PPH untuk Kabu/Kota Penghasil 611260 Belanja Bagi hasil PPH penghasil PPH penghasil 611271 Belanja Dana Bagi hasil PPH penghasil 611281 Belanja Bagi hasil PPH penghasil 611291 Belanja Bagi hasil PPH penghasil 611291 Belanja Bagi hasil PPH penghasil 611210 Belanja Bagi hasil PPH penghasil 611221 Belanja Dana Bagi hasil PPH penghasil 611231 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil PPP penghasilan 611232 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil PPP penghasilan 611233 Pengembalian B		Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk
Kabupaten/Kola Isinnya dalam Propinis penghasil.  11231 Belanja Dana Bagi Hasil Iuran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil luran tetap untuk Kab./Kola Menyalurkan bagi hasil luran tetap untuk Kab./Kola Menyalurkan bagi hasil luran tetap untuk Kab./Kola Menyalurkan bagi hasil luran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil kuran Tetap sebesar 16 % kepada Kabupaten/Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalli sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalli sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalli sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalli sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalli sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kola Larinnya dalam propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalli sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kola Larinnya dalam propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kola Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kola Lainnya dalam propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 3	611223	
Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil turan Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil iuran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil ruran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611233 Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil royalti untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611235 Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611241 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan 611241 Belanja Bagi hasil HIPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil HIPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil HIPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil HIPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611242 Belanja Bagi hasil HIPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611243 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611244 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611246 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611247 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611248 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611250 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611261 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611262 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPT psi 25/29 OP untuk Propinsi Menyakurkan bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyakurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPP psi 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111) 611314 Pengembalian Belanja Ba		
Memyalurkan bagi hasil turan Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil  611232 Belanja Bagi hasil turan Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611233 Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil royalti untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil  611234 Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil royalty untuk Kab./Kota benghasil  Menyalurkan bagi hasil royalty untuk Kab./Kota benghasil  611235 Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota benghasil  611240 Belanja Bagi hasil Kohutanan  611241 Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611242 Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611243 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  611246 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  611247 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota benghasil  611248 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota benghasil  611259 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota benghasil  611269 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  611260 Belanja Bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  61127 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psi 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psi 21 untuk Kabupaten/Kota  Menyakarkan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psi 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota  Menyakarkan kontra pos dari Belanja Bagi hasil	61123	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum
Belanja Bagi hasil turan tetap untuk Kabu/Kota Menyalurkan bagi hasil turan tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611233 Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil 611234 Belanja Bagi hasil royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil 611235 Belanja Bagi hasil royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611236 Belanja Bagi hasil royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611237 Belanja Bagi hasil royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611241 Belanja Bagi hasil Rhy untuk Kabu/Kota tainnya 611241 Belanja Bagi hasil HPH untuk Kabu/Kota Kepada Propinsi penghasil 611242 Belanja Bagi hasil HPH untuk Kabu/Kota Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kabu/Kota Penghasil 611243 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kabu/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kabu/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611245 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611252 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pepagakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi hasil PPP psl 21 untuk Kropinsi Menyalurkan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPP psl 22 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPP psl 25/29 OP u	611231	Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi
Menyalurkan bagi hasil ruran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil HPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611242 Belanja Bagi hasil HPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611243 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Pengembalian Belanja Bagi Pasil PSDH sebesar 32% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% secara merata kepada Propinsi (Mata Anggaran 611111)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611111)  Pengembalian Bela		Menyalurkan bagi hasil luran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
belanja Bagi hasil royalli untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil  Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Belanja Bagi hasil HPH untuk Ropinsi Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Ropinsi Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Ropinsi Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Ropinsi Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Ropinsi Menyalurkan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Robi./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesa	611232	Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota
Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611235 Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota lainnya  Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61124 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan  611241 Belanja Dana Bagi hasil HPH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611243 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil PsDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil PsDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan  61125 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  6113 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan  61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 tutuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		Menyalurkan bagi hasil luran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611235 Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 61124 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan 611241 Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611243 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 61125 Belanja Dana bagi Hasil Perlikanan 61125 Belanja Bagi hasil Perlikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Perlikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia 61126 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pejak Penghasilan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Krabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611233	Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi
Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil  Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61124 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan 611241 Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil IHPH untuk Propinsi penghasil  611242 Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611243 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH bebesar 16% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH bebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH bebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611246 Belanja Bagi hasil PSDH bebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611247 Belanja Bagi hasil PSDH bebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611248 Belanja Bagi hasil PSDH bebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611259 Belanja Bagi hasil PSDH bebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  611250 Belanja Bagi hasil PSDH bebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  611251 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan  611251 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan untuk Propinsi  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Rob./Kota  611253 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  611254 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  611255 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  611256 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  611267 Bengembalian Belanja Bagi Hasil Peplajakan  61127 Pengembalian Belanja Bagi Hasil Peplajakan  61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 6111113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Angga		Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611245 Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611241 Belanja Bagi hasil HPPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil HPPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil HPPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil HPPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611242 Belanja Bagi hasil HPPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611243 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil 611244 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611244 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611251 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia 611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111) 611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 6111112)	611234	Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil
Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan  611241 Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil IHPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  611243 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Bagi hasil Perikanan  611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Perikanan untuk Krob./Kota Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan  61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 6111112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611241 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan 611241 Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil HPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611242 Belanja Bagi hasil HPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611243 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611244 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia 611252 Belanja Bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia 611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 6113 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pip psi 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psi 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611111) 611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psi 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 6111112) 611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psi 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 6111112) 611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psi 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 6111113)	611235	Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota lainnya
611241 Belanja Bagi hasil IHPH untuk Krab./Kota Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611242 Belanja Bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611243 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil 611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 61125 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 61125 Belanja Bagi hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia 611252 Belanja Bagi hasil Perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611112) 611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113) 611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)		Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611242 Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab //Kota  Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611243 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan  611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab/Kota  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  61125 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)	61124	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan
611242 Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611243 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil 611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611251 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 611251 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan Menyalurkan bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611111) 611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 6111112) 611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 6111113) 611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 6111113)	611241	Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi
Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya  Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan  61126 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  6113 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pengajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 6111112)		Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil
Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab/Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab/Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH untuk Kab/Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab/Kota Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611112)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)	611242	Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota
Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil  611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan  611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil perikanan untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611244 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil 611245 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil 61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia 611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 61134 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajak Penghasilan 61131 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111) 611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611112) 611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113) 611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)	611243	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi
Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil  611245 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya  Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan  611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  61125 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pph psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil
611245 Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  6113 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan 611311 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611244	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil  61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil Perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  6113 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  611311 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil
61125 Belanja Dana bagi Hasil Perikanan 611251 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia 611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 6113 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 611311 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111) 611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113) 611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611245	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya
Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)		Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia  611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  6113 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan  611311 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	61125	Belanja Dana bagi Hasil Perikanan
611252 Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota  Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  6113 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan  611311 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611251	
Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia
61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 61131 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan 611311 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111) 611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112) 611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113) 611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611252	Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota
<ul> <li>Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan</li> <li>Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi</li> <li>Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)</li> <li>Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota</li> <li>Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)</li> <li>Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi</li> <li>Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)</li> <li>Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota</li> </ul>		Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
611311 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)  611312 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611311	
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)  611313 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611312	Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota		
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)  611314 Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611313	Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi
	27.310	
	611311	Pengembalian Belania Bagi hasil PPh nsl 25/29 OP untuk Kahunaten/Kota
	011314	

61132	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611321	Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi (Mata Anggaran 611121)
611322	Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611122)
611323	Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi (Mata Anggaran 611123)
611324	Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611124)
/11225	Dangambalian Dalania DDD bagian Damarintah Dugat yang dikambalikan ka Kabupatan/Kata
611325	Pengembalian Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota (Mata Anggaran
	611125)
	011120)
61133	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
611331	Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi
2001	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi (Mata Anggaran 611131)
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
611332	Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611132)
611333	Pengembalian Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota (Mata
	Anggaran 611133)
611334	Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan
	Merupakan kontra pos dari Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan
	(Mata Anggaran 611134)
/11225	Developed for Delania DDI ITD Device Developed Developed the bisson Adva Developed DDI ITD
611335	Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm. Pengkt. Pel. BPHTB
	Merupakan kontra pos dari Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm. Pengkt. Pel. BPHTB (Mata Anggaran 611135)
	011133)
611336	Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga
011000	Merupakan kontra pos dari Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga (Mata Anggaran
	611136)
6114	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
61141	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
611411	Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi (Mata Anggaran 611211)
(11110	
611412	Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611212)
411410	Dongombolian Bolonia Bagi hacil minyak humi untuk Kob IKata lainnya
611419	Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611213)
	ivierupakan kuntra pus uan beranja bayi nasii miinyak uunii untuk kau./kuta laliinya (iviata Angyaran 611213)
61142	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Gas Alam
611421	Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi
011721	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi (Mata Anggaran 611221)
	morapakan kontra poo dan bolanja bagi nasii gas alam antak i ropinsi (iviata Anggaran 011221)
611422	Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil
V.1144	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611222)
	The second of th
611429	Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya
011427	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611223)
	morapakan kontra poo dan bolanja bagi nasii gas alam antak kab/kota laininya (wata Anggalan on 1223)
61143	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum
611431	Pengembalian Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi
J 1 1 7 J I	1 - organization polarija pagritasti tatat totap artan i Topinsi

Pengembalian Belanja Bagi hasil luran letap untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil uran letap untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611232)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611233)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611234)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611234)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611235)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611235)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPU untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611235)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil IPPU untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611241)  Pengembalian Belanja Bagi hasil IPPU untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611241)  Pengembalian Belanja Bagi hasil IPPU untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611241)  Pengembalian Belanja Bagi hasil IPPU untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil IPPU untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil IPPU untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611244)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Jannya (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  Pengembalian Bagi Dana Bakali Huma Penghasi Penghaman untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 61211)  Pengembalian Dalu yan		Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi (Mata Anggaran 611231)
Mcrupakan kontra pos dari Bolanja Bagi hasil uran Istap untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611232)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota Penghasi Mcupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611233)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611234)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611234)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil vojaliy untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Kehutanan  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Hirih untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611241)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Hirih untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Hirih untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Pengembalian Belanja Bagi hasil Irih untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Nota Penghasil (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Penikanan  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Penikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  Pengembalian Belanja Bagi hasil Penikan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan		
Pergembalian Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Propinsi (Mala Anggaran 611233)  Fengembalian Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab Akota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab Akota Penghasil Merupakan bara pasa dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab Akota Penghasil (Mata Anggaran 611234)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab Akota Lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab Akota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Mihuranan  611441 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Khuranan Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Khuranan Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil HPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611241)  611442 Pengembalian Belanja Bagi hasil HIPH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611242)  611443 Pengembalian Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Rob Akota (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota Penghasil Menupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota Penghasil Menupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota Penghasil Menupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota kalinnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota kalinnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota kalinnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota kalinnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab Akota kalinnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab Akota (Mata Anggaran 611251)  Pengembalian DAU untuk Propinsi Penge	611432	
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil royallı unluk Prupinsi (Mala Anggaran 611233)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty unluk Kab. Kata Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty unluk Kab. Kata Penghasil (Mata Anggaran 611234)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty unluk Kab. Kata lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty unluk Kab. Kata lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil kehutanan  611441 Pengembalian Belanja Dana Bagi hasil HPH unluk Kab. Kata Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH unluk Kap. Kata Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH unluk Kab. Kata  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH unluk Kab. Kata  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Bainya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan unluk Kab. Kata Bainya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan unluk Kab. Kata Bainya (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan unluk Kab. Kata Bainya Baji Bainya Berikanan unluk Kab. Kata Bainya Baji Bainya Berikanan unluk Kab. Kata Bainya Baji Bainya Berikanan unluk Kab. Kata Magaran 611251)  61145 Pengembalian Bainya Bagi hasil Perikanan unluk Kab. Kata Magaran 611251)  61145 Pengembalian Dana Alokasi Umum  611461 Belanja Dana Alokasi Umum  61147 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61147 Pengembali		Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611232)
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil royallı unluk Prupinsi (Mala Anggaran 611233)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty unluk Kab. Kata Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty unluk Kab. Kata Penghasil (Mata Anggaran 611234)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty unluk Kab. Kata lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty unluk Kab. Kata lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil kehutanan  611441 Pengembalian Belanja Dana Bagi hasil HPH unluk Kab. Kata Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH unluk Kap. Kata Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH unluk Kab. Kata  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH unluk Kab. Kata  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH unluk Kab. Kata Bainya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan unluk Kab. Kata Bainya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan unluk Kab. Kata Bainya (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan unluk Kab. Kata Bainya Baji Bainya Berikanan unluk Kab. Kata Bainya Baji Bainya Berikanan unluk Kab. Kata Bainya Baji Bainya Berikanan unluk Kab. Kata Magaran 611251)  61145 Pengembalian Bainya Bagi hasil Perikanan unluk Kab. Kata Magaran 611251)  61145 Pengembalian Dana Alokasi Umum  611461 Belanja Dana Alokasi Umum  61147 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61147 Pengembali		
611434 Pengembalan Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab. Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab. Kota Penghasil (Mata Anggaran 611234) 611439 Pengembalan Bolanja Bagi hasil oyaliy untuk Kab. Kota lainnya (Mata Anggaran 611235) 61144 Pengembalan Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan Pengembalan Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan Pengembalan Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan Pengembalan Bagi Bagi hasil Perlumbuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611241) 611442 Pengembalan Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab. Kota (Mata Anggaran 611242) 611443 Pengembalan Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab. Kota (Mata Anggaran 611242) 611444 Pengembalan Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab. Kota (Mata Anggaran 611243) 611444 Pengembalan Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab. Kota (Mata Anggaran 611243) 611444 Pengembalan Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab. Kota lainnya (Mata Anggaran 611244) 611449 Pengembalan Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab. Kota lainnya (Mata Anggaran 611244) 611449 Pengembalan Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab. Kota lainnya (Mata Anggaran 611245) 611451 Pengembalan Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab. Kota lainnya (Mata Anggaran 611246) 611452 Pengembalan Belanja Bagi hasil Perlikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611245) 611451 Pengembalan Belanja Bagi hasil Perlikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251) 611452 Pengembalan Belanja Bagi hasil Perlikanan untuk Rob. Kota (Mata Anggaran 611251) 611454 Pengembalan Dana Alokasi Umum 61216 Belanja Dana Alokasi Umum 61217 Belanja Dana Alokasi Umum 61218 Belanja Dana Alokasi Umum 61219 Pengembalan Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112) 6132 Belanja Dana Alokasi Khususi 6132 Belanja Dana Alokasi Khususi	611433	
Mcrupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611234)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611235)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil kehutanan Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611241)  Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611243)  611444 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611243)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61146 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611251)  61146 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61147 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61148 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61149 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana		Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi (Mata Anggaran 611233)
Mcrupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611234)  Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611235)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil kehutanan Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611241)  Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611243)  611444 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611243)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61146 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611251)  61146 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61147 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61148 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61149 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana	(11101	Down whallen Dalaria Dari haril and brought Wate Downland
611439 Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Kehutanan 611441 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan 611441 Pengembalian Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611241) 611442 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242) 611443 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611243) 611444 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245) 61145 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245) 61145 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 611451 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 61125) 61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251) 61145 Pengembalian Balanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252) 612 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612231 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61234 Belanja Dana Alokasi Umum 61234 Belanja Dana Alokasi Umum 6	611434	
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611235)  611441 Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611241)  611442 Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611242)  611443 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan Merupakan banda Alokasi Umum Merupakan DAU yang merupakan bagian Propinsi (Mata Anggaran 611251)  Merupakan DAU untuk Propinsi Merupakan Bagian Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 61251)  Pengembalian Dana Alokasi Umum Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Meru		Merupakan kunta pus uan Belanja Bagi nasii uyany untuk kab./kuta Penghasii (Mata Anggaran 6 17234)
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611235)  611441 Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611241)  611442 Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611242)  611443 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan Merupakan banda Alokasi Umum Merupakan DAU yang merupakan bagian Propinsi (Mata Anggaran 611251)  Merupakan DAU untuk Propinsi Merupakan Bagian Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 61251)  Pengembalian Dana Alokasi Umum Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Meru	611/20	Dongombalian Polania Pagi basil ayalty untuk Kah /Kata lainnya
61144 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil HiPH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611241)  611442 Pengembalian Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kabi.Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kabi.Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HiPH untuk Kabi.Kota (Mata Anggaran 611242)  611443 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  611444 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kabi.Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kabi.Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kabi.Kota Penghasil (Mata Anggaran 611243)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kabi.Kota lainnya (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kabi.Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  611451 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kabi.Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kabi.Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kabi.Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kabi.Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kabi.Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kabi.Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan Merupakan kontra pos dari Belanja Balu untuk Kabi.Mata Anggaran 611252)  6122 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja	011437	<u> </u>
Pengembalian Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi Merupokan konira pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  611443 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  611454 Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum Merupakan bagi Dana Bagi Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  613 Belanja Dana Alokasi Umum Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  614 Pengembalian Dana Alokasi Umum Merupakan konira pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan konira pos dari Belanja DAU untuk Kabupate		Wordpakan kontra pos dan Bolanja Bagi nasii oyang antak kabantota lainnya (wata miggaran 0 11255)
Pengembalian Belanja Bagi hasil HPH untuk Propinsi Merupokan konira pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  611443 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  611454 Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum Merupakan bagi Dana Bagi Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  613 Belanja Dana Alokasi Umum Merupakan konira pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  614 Pengembalian Dana Alokasi Umum Merupakan konira pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan konira pos dari Belanja DAU untuk Kabupate	61144	Pengembalian Belania Dana Bagi Hasil Kehutanan
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  612 Belanja Dana Alokasi Umum  6121 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota  Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61213 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota  Pengembalian Dana Alokasi Umum  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian DAU untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  P		
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mala Anggaran 611243)  611444 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana DaU yang merupakan bagian Propinsi.  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian DAU untuk Pepinsi (Mata Anggaran 612111)  6131 Belanja DAN Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK On-Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non DR Pendidikan  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan		
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil HPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mala Anggaran 611243)  611444 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana DaU yang merupakan bagian Propinsi.  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian DAU untuk Pepinsi (Mata Anggaran 612111)  6131 Belanja DAN Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK On-Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non DR Pendidikan  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan		
Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Rab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan  611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan 611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61211 Belanja DAM untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Dau alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra po	611442	Pengembalian Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan  611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota (Mata Anggaran 611251)  612 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61221 Belanja DaNu Untuk Propinsi  Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  61221 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten		Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota Penghasil  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan  611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota (Mata Anggaran 611251)  612 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61221 Belanja DaNu Untuk Propinsi  Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  61221 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten		
611444 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  611449 Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Krab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611251)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum  6121 Belanja Dana Alokasi Umum  6121 Belanja Dana Alokasi Umum  6121 Belanja Dalu untuk Kabupaten/Kota  Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61211 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota  Pengembalian Dana Alokasi Umum  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61222 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61223 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61224 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61251 Belanja DAK Dana Reboisasi  61361 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6133 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6134 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  61351 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  61361 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  61371 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  61381 Belanja DAK Non DR Pendidikan	611443	
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota (Mata Anggaran 611251)  612 Belanja Dana Alokasi Umum 6121 Belanja DAU untuk Kab untuk Kab paten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61213 Belanja DAK Nontuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612111) 613 Belanja DAK Dana Reboisasi 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 6131 Belanja DAK Non DR Pendidikan 6132 Belanja DAK Non DR Pendidikan		Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)  Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab /Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab /Kota (Mata Anggaran 611251)  612 Belanja Dana Alokasi Umum 6121 Belanja DAU untuk Kab untuk Kab paten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61213 Belanja DAK Nontuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612111) 613 Belanja DAK Dana Reboisasi 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 6131 Belanja DAK Non DR Pendidikan 6132 Belanja DAK Non DR Pendidikan	/11///	Demonstration Detects Destrict CODI and the Mate West Demonstration
Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  61145 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja DAU untuk Propinsi Pengetuaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61212 Belanja Dana Alokasi Umum 61213 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61214 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61215 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612211 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612213 Belanja Dana Alokasi Umum 612214 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612215 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612216 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612217 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612218 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612219 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612210 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kab	611444	
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab:/Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab:/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab:/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab:/Kota (Mata Anggaran 611252)  Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  6133 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  613 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6133 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6134 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6135 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6136 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6137 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6138 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6139 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi		Merupakan kuntra pus dan Belanja Bagi nasii PSDH untuk Kab./Kuta Penghasii (Mata Anggaran 611244)
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab:/Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)  Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab:/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab:/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab:/Kota (Mata Anggaran 611252)  Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  6133 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  613 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6133 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6134 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6135 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6136 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6137 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6138 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6139 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi	611//0	Dongombalian Rolania Ragi basil DSDH untuk Kah /Kata lainnya
61145 Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251) 611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252) 612 Belanja Dana Alokasi Umum 6121 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi. 61211 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota. 6122 Pengembalian Dau alokasi Umum 61221 Pengembalian Dau untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111) 61221 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111) 61222 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612111) 613 Belanja DAR Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi	011447	
611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum 6121 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61212 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja DAK Dana Reboisasi 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi		Wordpakan kontra pos dan bolanja bagi nasir i Sbiri untuk Kabankota lainnya (wata Anggaran 011245)
611451 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum 6121 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61212 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja DAK Dana Reboisasi 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi	61145	Pengembalian Belania Dana Bagi Hasil Perikanan
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)  611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum  6121 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  61211 Pengembalian Dau Alokasi Umum  61211 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612111)  613 Belanja DAK Dana Reboisasi  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK Nan Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non DR Pendidikan  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan		
611452 Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab //Kota (Mata Anggaran 611252)  612 Belanja Dana Alokasi Umum  6121 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Jountuk Propinsi  Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  612112 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota  Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  612112 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dau a Alokasi Umum  61221 Pengembalian DAU untuk Propinsi  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota  Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan		, , ,
Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)  Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja Dana Alokasi Umum  61211 Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  612112 Belanja DAU untuk Kabupater/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  61211 Pengembalian Dana Alokasi Umum  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dau Untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupater/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupater/Kota (Mata Anggaran 612111)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan		
612 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja Dana Alokasi Umum 61211 Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  612112 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  61212 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian DAU untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR Pendidikan	611452	
6121       Belanja Dana Alokasi Umum         61211       Belanja Dana Alokasi Umum         612111       Belanja DAU untuk Propinsi         Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.         612112       Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota         Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.         6122       Pengembalian Dana Alokasi Umum         6122.11       Pengembalian Dana Alokasi Umum         612211       Pengembalian DAU untuk Propinsi         Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)         612212       Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota         Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)         613       Belanja Dana Alokasi Khusus         6131       Belanja DAK Dana Reboisasi         61311       Belanja DAK Dana Reboisasi         61311       Belanja DAK Dana Reboisasi         61311       Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.         6132       Belanja DAK Non-Dana Reboisasi         61321       Belanja DAK Non DR Pendidikan         613211       Belanja DAK Non DR Pendidikan		Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)
6121       Belanja Dana Alokasi Umum         61211       Belanja Dana Alokasi Umum         612111       Belanja DAU untuk Propinsi         Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.         612112       Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota         Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.         6122       Pengembalian Dana Alokasi Umum         6122.11       Pengembalian Dana Alokasi Umum         612211       Pengembalian DAU untuk Propinsi         Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)         612212       Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota         Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)         613       Belanja Dana Alokasi Khusus         6131       Belanja DAK Dana Reboisasi         61311       Belanja DAK Dana Reboisasi         61311       Belanja DAK Dana Reboisasi         61311       Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.         6132       Belanja DAK Non-Dana Reboisasi         61321       Belanja DAK Non DR Pendidikan         613211       Belanja DAK Non DR Pendidikan		
61211       Belanja Dana Alokasi Umum         612111       Belanja DAU untuk Propinsi         Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.         612112       Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota         Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.         6122       Pengembalian Dana Alokasi Umum         612211       Pengembalian DaNa Untuk Propinsi         Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)         612212       Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota         Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)         613       Belanja Dana Alokasi Khusus         6131       Belanja DAK Dana Reboisasi         61311       Belanja DAK Dana Reboisasi         61311       Belanja DAK Dan Reboisasi         61321       Belanja DAK Non-Dana Reboisasi         6132       Belanja DAK Non-Dana Reboisasi         61321       Belanja DAK Non DR Pendidikan         61321       Belanja DAK Non DR Pendidikan		
612111 Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  612112 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612211 Pengembalian DAU untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612111)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Nana Reboisasi 61311 Belanja DAK Nana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan		•
Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.  612112 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612211 Pengembalian DAU untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612111)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Non Dara Reboisasi 61311 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan		
612112 Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian DAU untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil. 6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan	012111	
Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dau untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		Ferigetuaran DAO yang merupakan bagian Fropinsi.
Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.  Pengembalian Dana Alokasi Umum  61221 Pengembalian Dau untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan	612112	Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota
6122 Pengembalian Dana Alokasi Umum 61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612211 Pengembalian DAU untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111) 612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112) 613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil. 6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR Pendidikan		
61221 Pengembalian Dana Alokasi Umum 612211 Pengembalian DAU untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111) 612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112) 613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil. 6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		
612211 Pengembalian DAU untuk Propinsi Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		
Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)  Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  Belanja Dana Alokasi Khusus  Belanja DAK Dana Reboisasi Belanja DAK Dana Reboisasi Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  Belanja DAK Non-Dana Reboisasi Belanja DAK Non-Dana Reboisasi Belanja DAK Non-Dana Reboisasi Belanja DAK Non DR Pendidikan  Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		V
612212 Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan	612211	
Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil  Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan  613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)
Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)  613 Belanja Dana Alokasi Khusus  6131 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK Dana Reboisasi  61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil  Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi  61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan  613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan	/10010	Dangambalian DALL untuk Kabupatan/Kata
613 Belanja Dana Alokasi Khusus 6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil. 6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan	612212	
6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil. 6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		i werupakan kunta pus uan belanja DAO untuk Kabupaten/kuta (wata Anggafan 612112)
6131 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 61311 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil. 6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan	613	Relania Dana Alokasi Khusus
61311 Belanja DAK Dana Reboisasi 613111 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		
613111 Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil  Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		*
Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.  6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		,
6132 Belanja DAK Non-Dana Reboisasi 61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		
61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan		r ongotaaran britt yang borsambor dan dana rebuisasi dan digunakan dinak kegialan rebuisasi di daeran penghasil.
61321 Belanja DAK Non DR Pendidikan 613211 Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan	6132	Belanja DAK Non-Dana Reboisasi
	61321	·
Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan pendidikan	613211	Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan
and the second control of the second control		Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan pendidikan

61322	Belanja DAK Non DR Kesehatan
613221	Belanja DAK Non DR untuk Kesehatan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan kesehatan
	Tongoladian Drikk yang alganakan antak kegialan non repolsasi tapi alganakan antak kegialan kesenatan
61323	Belanja DAK Non DR Infrastruktur
613231	Belanja DAK Non DR untuk Infrastruktur
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan infrastruktur.
61324	Belanja DAK Non DR Pemekaran Daerah (Pemerintahan)
613241	Belanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan pemekaran pemerintah
61325	Belanja DAK Non DR Kelautan dan Perikanan
613251	Belanja DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan
010201	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan kelautan dan perikanan
	r engeluaran benk yang digunakan dituk kegiatan non rebolsasi tapi digunakan dituk kegiatan keladian dan penkanan
61326	Belanja DAK Non DR Pertanian
613261	Belanja DAK Non DR untuk Pertanian
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan pertanian
61327	Polonia DAV Non DD Lingkungan Hidun
61327	Belanja DAK Non DR Lingkungan Hidup  Belanja DAK Non DR untuk Lingkungan Hidup
013271	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan Lingkungan Hidup
	r engeluaran DAK yang digunakan dituk kegialan non-reboisasi tapi digunakan dituk kegialan Engkungan muup
6133	Pengembalian DAK Dana Reboisasi
61331	Pengembalian DAK Dana Reboisasi
613311	Pengembalian DAK DR untuk Daerah Penghasil
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil (Mata Anggaran 613111)
6134	Pengembalian DAK Non-Dana Reboisasi
61341	Pengembalian Pak Non-Daha Reboisasi Pengembalian Pendidikan DAK Non DR Pendidikan
613411	Pengembalian DAK Non DR untuk Pendidikan
0.0	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan (Mata Anggaran 613211)
61342	Pengembalian DAK Non DR Kesehatan
613421	Pengembalian DAK Non DR untuk Kesehatan
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Kesehatan (Mata Anggaran 613221)
61343	Pengembalian DAK Non DR Infrastruktur
613431	Pengembalian DAK Non DR untuk Infrastruktur
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Infrastruktur (Mata Anggaran 613231)
61344	Pengembalian DAK Non DR Pemekaran Pemerintah
613441	Pengembalian DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah (Mata Anggaran 613241)
61345	Pengembalian DAK Non DR Kelautan dan Perikanan
613451	Pengembalian DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan (Mata Anggaran 613251)
61346	Pengembalian Belanja DAK Non DR Pertanian
613461	Pengembalian Belanja DAK Non DR untuk Pertanian
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Pertanian (Mata Anggaran 613261)
61347	Pengembalian Belanja DAK Non DR Lingkungan Hidup
613471	Pengembalian Belanja DAK Non DR untuk Lingkungan Hidup
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Lingkungan Hidup (Mata Anggaran 613271)
62	Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
621	Belanja Dana Otonomi Khusus
6211	Belanja Dana Otonomi Khusus
62111	Belanja Dana Otonomi Khusus

621111	Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua
021111	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21
	Tahun 2001
621119	Belanja Dana Otonomi Khusus Lainnya
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, serta untuk membiayai pos anggaran tertentu dalam
	belanja daerah apabila ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada pos anggaran tersebut (selain papua).
6212	Pengembalian Dana Otonomi Khusus
62121	Pengembalian Dana Otonomi Khusus
621211	Pengembalian Dana Otonomi Khusus untuk Papua
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua (Mata Anggaran 621111)
621219	Pengembalian Dana Otonomi Khusus Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Otonomi Khusus Lainnya (Mata Anggaran 621119)
622	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang
6221	Belanja Murni
62211	Belanja Murni
622111	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni
	Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus
	dan Penyeimbang) untuk Propinsi Murni
622112	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni
	Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus
	dan Penyeimbang) untuk Kabupaten/Kota Murni.
(222	Delavia Adhaa
6222	Belanja Ad hoc
62221 622211	Belanja Ad hoc  Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc
022211	
	Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang) untuk Propinsi Ad hoc
622212	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc
	Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus
	dan Penyeimbang) untuk Kabupaten/Kota Ad hoc.
(000	
6223	Pengembalian Murni
62231	Pengembalian Murni  Pengembalian Pana Penyagaian/Penyajarahang untuk Pranjasi Murni
622311	Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni  Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni (Mata Anggaran 622111)
	werupakan kunta pus dan belanja bana Penyesualan/Penyelinbang untuk Propinsi wumi (wata Anggaran 022111)
622312	Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni (Mata Anggaran 622112)
6224	Pengembalian Ad hoc
62241	Pengembalian Ad hoc
622411	Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc (Mata Anggaran 622211)
622412	Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc (Mata Anggaran
	622212)
7	DEMDIAVAAN
7 71	PEMBIAYAAN  Penerimaan Pembiayaan
711	Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
7111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71111	Penerimaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dari Bank dalam negeri.
711111	Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan
7.1111	Penerimaan yang bersumber dari Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri untuk
	menutup kekurangan dana dalam jangka pendek, dan jatuh tempo dalam periode yang tidak lebih dari satu tahun.  (konfirmasi ke Dir PKN)
	menutup kekurangan dana dalam jangka pendek, dan jatuh tempo dalam periode yang tidak lebih dari satu tahun.

711112	Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
711112	Penerimaan pinjaman dari Bank dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun.
	Penerimaan pinjaman dan bank dalam negen yang memiliki jadun tempo tidak lebih dan satu tahun.
711112	Denoriman Sica Anggaran Labih (SAL)
711113	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
	Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya dan besar penggunaan dalam pembiayaan dengan
	sepengetahuan DPR.
71112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan dana moratorium
711121	Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh
	Penerimaan dari cadangan moratorium Aceh
7112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
71121	Penerimaan Hasil Privatisasi
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi
	Penerimaan dari hasil penjualan saham.
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
	Penerimaan dari penjualan aset restrukturisasi perbankan/pengembalian dana talangan dari BPPN
7114	Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi
71141	Penerimaan Obligasi Dalam Negeri – Jangka Pendek
711411	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Pendek
711411	MAP 711411 mengimbangi MAK 721312. Karena tidak ada penerimaan, MAP ini digunakan hanya untuk memungkinkan
	pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali .
	polaporali terridadp atarig yang aljadadikan kembali .
711/10	Danarimaan Danarhitan/Daniuslan Ohlimai DN Langka Dandak
711412	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN – Jangka Pendek
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan obligasi dlm negeri yg jatuh tempo dlm periode tidak lebih dari satu tahun.
711413	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek
	Penerimaan bunga obligasi dalam negeri jangka pendek dari obligor (pembeli obligasi pemerintah) yang diterima pada saat
	penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi (accrued interest).
71142	Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang
711421	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Panjang
	Penerimaan dari penjadualan kembali obligasi dalam negeri jangka panjang. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya,
	MAK ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali.
711422	Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi – Jangka Panjang
	Penerimaan dari Investasi atas obligasi yang sudah dibayar kembali oleh penerbit obligasi (issuer).
711423	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang
	Penerimaan bunga obligasi dalam negeri jangka panjang dari obligor yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan
	dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
711424	Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan obligasi dalam negeri yang jatuh tempo dalam periode lebih dari satu tahun.
	July July July addin policio losin dall dalla control dall
71143	Penerimaan Obligasi Luar Negeri
711431	Penerimaan Obligasi Luar Negeri  Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN
711731	Penerimaan dari penerbitan atau penjualan obligasi Negara di bursa luar negeri.
	r enermaan van penerbitan atau penjualan obligasi ivegara ut butsa tuat negen.
711432	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN
111432	
	Penerimaan bunga obligasi luar negeri dari obligor yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
	Ropada obiigoi pada saat jatan tempo banga obiigasi.
71144	Danarimaan Curat I Itang Darbandaharaan Dalam Magari Jangka Dandah
71144	Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN yang jatuh tempo dalam periode kurang dari satu
	tahun.
711442	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
. / 1 1 4 4 /	r eenenmaan dan eenadualah kembali Sulai Hiand eemendaharaan UN = Tandka eendek

	Penerimaan dari penjadualan kembali Surat Utang Perbendaharaan DN Jangka Pendek. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, MAK ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap surat utang perbendaharaan DN yang dijadualkan kembali.
71145	Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang
711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN yang jatuh tempo dalam periode lebih dari satu tahun.
711452	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	Penerimaan dari penjadualan kembali Surat Utang Perbendaharaan DN Jangka Panjang. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, MAK ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap surat utang perbendaharaan DN yang dijadualkan kembali. MAP 711452 mengimbangi MAK 721342.
7115	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71151	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
711511	Pengembalian Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan (Mata Anggaran 711111)
711512	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan (Mata Anggaran 711112)
711513	Pengembalian Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) (Mata Anggaran 711113)
71152	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium
711521	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium untuk Cadangan Aceh
	Merupakan kontra pos dari penerimaan pembiayaan dari dana eks moratorium untuk Cadangan Aceh
7116	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
71161	Pengembalian Penerimaan Hasil Privatisasi
711611	Pengembalian Penerimaan Hasil Privatisasi
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Hasil Privatisasi (Mata Anggaran 711211)
7117	Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71171	Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711711	Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi (Mata Anggaran 711311)
7118	Pengembalian Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi
71181	Pengembalian Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek
711811	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 711411)
711812	Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 711412)
711813	Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek
711013	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek (Mata Anggaran 711413)
71182	Pengembalian Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang
711821	Pengembalian Penerimaan obligasi Dalain Negeri - Jangka Panjang  Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Panjang
711021	Merupakan kontra pos dari Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Panjang (Mata Anggaran 711421)
711822	Pengembalian Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi – Jangka Panjang (Mata Anggaran 711422)
711823	Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang
711023	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang (Mata Anggaran 711423)
711824	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
, , , , , , , ,	r i ongonization i onormaan r ombia jaan antak obligabi balam Nogon Jangka r anjang

	711424)
74400	December 1 on December 2 of Providence Manual
<b>71183</b> 711831	Pengembalian Penerimaan Obligasi Luar Negeri
/11831	Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN (Mata Anggaran 711431)
	Merupakan kunta pus dan Penerimaan Penerbitan/Penjuaian Obiigasi Liv (Mata Anggaran 711451)
711832	Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN (Mata Anggaran 711432)
71184	Pengembalian Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek
711841	Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
711011	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek (Mata
	Anggaran 711441)
711842	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
711042	Merupakan kontra pos dari Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
	(Mata Anggaran 711442)
71185	Pengembalian Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang
711851	Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang  Marupakan kentra pas dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Penjang (Mata
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang (Mata Anggaran 711451)
711852	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	(Mata Anggaran 711452)
712	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
7121	Penarikan Pinjaman Program
71211	Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712111	Penarikan Pinjaman Program dari OECF
	Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman, yaitu Jepang.
712112	Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
712112	Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman selain Jepang.
	To the mindent pringulation program was thought a permoon pringulation sold in
71212	Penarikan Pinjaman Program Multilateral
712121	Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional IBRD.
712122	Penarikan Pinjaman Program dari ADB
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional ADB.
710100	Departure Diniomore Program Multilatoral Laimeura
712123	Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional lainnya selain IBRD dan ADB.
	י פוסה המעד איין שהדים איין איין איין איין איין איין איין אי
7122	Penarikan Pinjaman Proyek
71221	Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
712211	Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
	Penerimaan pinjaman proyek dari Pemerintah suatu negara melalui lembaga/ badan keuangan yang dibentuk oleh negara
	bersangkutan untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pinjaman/hibah kepada negera-negara penerima.
71222	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
712221	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
	Penerimaan pinjaman proyek dari lembaga/badan internasional seperti IBRD, ADB, IDA, IFAD dll.
71223	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
712231	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
	Penerimaan dari pinjaman proyek yang disediakan dan dijamin oleh suatu negara melalui lembaga pengembang ekspornya
	kepada Pemerintah Indonesia untuk pembelian barang modal dan atau jasa dari negara pemberi pinjaman untuk keperluan proyek-proyek Pemerintah.
	F7 F7 Ss
71224	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

712241	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
7.22	Penerimaan dari pinjaman proyek yg diberikan kpd Pemerintah utk membiayai pembelian barang dan atau jasa dgn cara
	angsuran dari suatu perusahaan leasing di luar negeri berdasarkan KJB antara proyek dan pemasok.
71225	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
712251	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
	Penerimaan dari pinjaman dengan persyaratan komersial yang dananya diterima secara tunai dengan tujuan untuk
	keperluan Pemerintah lainnya.
71229	Panarikan Dinjaman Prayak Lainnya
71229	Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
112291	Penerimaan pinjaman luar negeri yang tidak termasuk dalam klasifikasi penerimaan pinjaman yang lain.
	r enermaan pinjaman dar negeri yang daak termasak dalam klasilikasi penermaan pinjaman yang lain.
7123	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program
71231	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712311	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari OECF
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program dari OECF (Mata Anggaran 712111)
712312	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya (Mata Anggaran 712112)
71232	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Multilateral
71232	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
712321	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program dari IBRD (Mata Anggaran 712121)
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
712322	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari ADB
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program dari ADB (Mata Anggaran 712122)
712323	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya (Mata Anggaran 712123)
7104	Develophelian Develophen Dinianan Develo
7124 71241	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
71241	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
712711	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral (Mata Anggaran 712211)
	, and a property of the second
71242	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
712421	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral (Mata Anggaran 712221)
71243	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
712431	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor  Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor (Mata Anggaran 712231)
	Merupakan kunta pus uan Penankan Pinjaman Proyek Fasilias Kreuli Ekspor (Mata Anggaran 712231)
71244	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
712441	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Leasing (Mata Anggaran 712241)
71245	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
712451	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Komersial (Mata Anggaran 712251)
71040	Dengembelian Dengrikan Dinjamen Presidel Leinnus
<b>71249</b> 712491	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
712491	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya (Mata Anggaran 712291)
	Morapakan kontra pos dan i onankan i injaman i toyok Lainnya (wata Anggalan / 12271)
713	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
7131	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71311	Penerimaan Pinjaman Program
713111	Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman program. MAP 1351/713111 mengimbangi
	MAK 6351/723111.
74045	
71312	Penerimaan Pinjaman Proyek

713121	Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
713121	Penerimaan dari penjadualan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman proyek. MAP 1352/713121 mengimbangi MAK
	6352/723211.
	0552/725211.
7132	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71321	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Program
713211	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri (Mata Anggaran 713111)
	Aligyalati / 13111)
71222	Describeding Description District Provide
71322	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Proyek
713221	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri (Mata
	Anggaran 713121)
71.4	Describes and desi Describe des Marchell Describe des Norma Hannel con March
714	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
7141	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71411	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714111	Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, MAP ini
	digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali. MAP 1353/714111
	mengimbangi MAK 5711/723311.
7142	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71421	Pengembalian Penerimaan Penjadulan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714211	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri (Mata Anggaran
	714111)
715	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
7151	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
71511	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
715111	Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
715112	Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)
	Penerimaan dari dana anggaran pembangunan yang sudah dicadangkan sebelumnya.
7152	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
71521	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
715211	V 1 ' D 1 1 CH D1 ' W V CT 1 V
	Koreksi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
ļ	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran
	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)
715212	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)
715212	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)
	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)
72	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan
<b>72</b> 721	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
72 721 7211	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
72 721 7211 72111	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
72 721 7211	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
72 721 7211 72111	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
72 721 7211 72111 721111	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan  Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)
72 721 7211 72111	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan  Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
72 721 7211 72111 721111	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan  Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)
72 721 7211 72111 721111 721111	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)  Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan  Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan  Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan  Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)
72 721 7211 72111 721111	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)
72 721 7211 72111 721111 721111	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri — Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri — Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri — Perbankan untuk Moratorium Belanja Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
72 721 7211 72111 721111 721112	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)
72 721 7211 72111 721111 721112	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium Belanja Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
72 721 7211 72111 721111 721112	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium Belanja Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
72 721 7211 72111 721111 721112 72112 72112	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium Belanja Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Eks Moratorium untuk Cadangan Aceh
72 721 7211 72111 721111 721112 72112 72112 7212	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)  Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)  Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)  Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium Belanja Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Eks Moratorium untuk Cadangan Aceh  Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan

7213	Belanja Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi
72131	Belanja Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek
721311	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek
721011	Pelunasan/pembayaran kembali obligasi dalam negeri jangka pendek (yang diterima dari MAP 711412).
721312	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
721012	Pengeluaran berkaitan dengan penjadualan kembali obligasi dalam negeri jangka pendek. Karena tidak ada pengeluaran
	sesungguhnya, MAK ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali.
721313	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
721313	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) obligasi dalam negeri jangka pendek.
721214	Delaria Demberrara Ilbara Dimas Oblinasi Nagara Delara Nagari Jamela Dendal.
721314	Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek Pembayaran bunga obligasi dalam negeri jangka pendek kepada obligor (pembeli obligasi pemerintah) pada saat jatuh
	tempo bunga obligasi.
72132	Belanja Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang
721321	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali obligasi dalam negeri jangka panjang (yang diterbitkan dari MAP 711424).
721322	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
721322	Pelunasan obligasi dalam negeri jangka panjang yang telah dijadualkan kembali.
721323	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
721323	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) obligasi dalam negeri jangka panjang.
	r engeluaran berkaltan dengan pembelian kembali (buyback) obligasi dalam negeri jangka panjang.
721324	Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang
	Pembayaran bunga obligasi dalam negeri jangka panjang kepada obligor (pembeli obligasi pemerintah) pada saat jatuh
	tempo bunga obligasi.
72133	Belanja Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek
721331	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
	Pengeluaran untuk pelunasan surat utang perbendaharaan DN jangka pendek.
721332	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
721002	Pelunasan surat utang perbendaharaan DN jangka pendek yang telah dijadualkan kembali.
	- clandean canat atang personaananaan 211 jangta penaen jang telah ajadaanan tembah
721333	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek.
72134	Belanja Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang
721341	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	Pengeluaran untuk pelunasan surat utang perbendaharaan DN jangka panjang.
721342	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
721342	Pelunasan surat utang perbendaharaan DN jangka panjang yang telah dijadualkan kembali.
701040	Deba's December 2014 and Contains Deba address 2014 and 2
721343	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka panjang.
	Pengeluaran berkalian dengan pembelian kembali (buyback) Surat Otang Perbendanaraan DN - Jangka panjang.
72135	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri
721351	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional
	Pengeluaran untuk pelunasan Obligasi pemerintah yang diperjualbelikan di Bursa Efek luar negeri.
721352	Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) Obligasi pemerintah yang diperjualbelikan di Bursa Efek luar
	negeri.
721353	Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
	Pengeluaran pembayaran bunga Obligasi Negara luar negeri dari pemerintah atas penerimaan bunga yang diterima pada saat penjualan Obligasi Negara luar negeri kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
7214	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

72141	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
721411	Pengembalian Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan (Mata Anggaran 721111)
721412	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
721412	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan (Mata Anggaran 721112)
	Wei upakan kuntra pus uan belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Penuek Perbankan (wata Anggaran 721112)
72142	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium
721421	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
	Mrupakan kontra pos Pengeluaran pembiayaan Eks Moratorium untuk Cadangan Aceh
7215	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
72151	Pengembalian Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
721511	Pengembalian Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
721011	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi (Mata Anggaran 721211)
7216	Pengembalian Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi
72161	Pengembalian Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek
721611	Pengembalian Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 721311)
	morapatan Konta pos dan Bolanja i Sngoladram olandodin obilgdor Brit olandor (mata / mggaran / 2 10 11)
721612	Pengembalian Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
	(Mata Anggaran 721312)
721613	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
121013	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	(Mata Anggaran 721313)
	(Wata Anggaran 721010)
721614	Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek (Mata
	Anggaran 721314)
72162	Dangambalian Ohligasi Dalam Nagari Jangka Banjang
721621	Pengembalian Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Pengembalian Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang
721021	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang (Mata Anggaran 721321)
	Wellupakan kuntra pus uam belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang (wata Anggaran 721521)
721622	Pengembalian Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
	(Mata Anggaran 721322)
721623	Dengambalian Dengaluaran Dalunggan Obligasi DN - Jangka Denjang malalui Dembalian Kembali
/21023	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali  Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	(Mata Anggaran 721323)
701/01	December 1
721624	Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang (Mata Anggaran 721324)
701/0	December 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
<mark>72163</mark> 721631	Pengembalian Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
121031	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek (Mata
	Anggaran 721331)
701/00	Describellar Describerary Debugger Constitution Debugger DN 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
721632	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali (Mata Anggaran 721332)
721633	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui
	Pembelian Kembali (Mata Anggaran 721333)
7047	Describelles Describeres Obligation 1914 and 191
72164	Pengembalian Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang

721641	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang (721321)
721642	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadwalan Kembali (721322)
721643	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali (721323)
72165	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri
721651	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional (Mata Anggaran 721351)
721652	Pengembalian Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 721352)
721653	Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 721353)
722	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
7221	Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
72211	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
722111	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman program yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
722112	Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
	Pengeluaran untuk pembayaran/cicilan pokok utang luar negeri dari Pinjaman Program
72212	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
722121	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman proyek yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
722122	Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
	Pengeluaran untuk cicilan pokok utang luar negeri dari Pinjaman Proyek
7222	Pengembalian Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
72221	Pengembalian Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
722211	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program (Mata Anggaran 722111)
722212	Pengembalian Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program (Mata Anggaran 722112)
70000	Describellar Ciailar Dahah Harra Luar Nasari Birianan Brasal
<b>72222</b> 722221	Pengembalian Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
122221	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 722121)
722222	Pengembalian Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 722122)
723	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
	Pengeluaran yang berasal dari penjadualan kembali utang luar-negeri jangka-panjang yang jatuh tempo selama tahun anggaran tetapi tidak dibayar kembali dengan uang. MAK-MAK di bawah sub kelompok ini hanya disediakan untuk memungkinkan pelaporan terhadap ut
7231	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program
	Pengeluaran berkaitan dengan penjadualan kembali utang luar negeri dari pinjaman program.

723111	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
	Pengeluaran dari penjadualan kembali utang LN – pinjaman program.
7232	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72321	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
723211	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
7233	Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72331	Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723311	Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
7234	Dengambalian Dalunggan Dakak Utang Luar Nagari malalui Daniadualan Kambali. Diniaman Dragram
72341	Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program  Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
72341	Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
723411	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program (Mata Anggaran 723111)
	Werdpakan kontra pos dan i engeldaran i enjaddaran kembali otang Erv i injaman i rogram (wata Anggaran 725111)
7235	Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72351	Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
72351	Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
. 20011	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 723211)
	The state of the s
7236	Pengembalian Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72361	Pengembalian Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723611	Pengembalian Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri (Mata Anggaran 723311)
724	Penyertaan Modal Pemerintah
7241	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
72411	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
724111	PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Penyertaan modal pemerintah pada BUMN
7242	Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
72421	Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
72421	PMP untuk Badan Internasional
721211	Penyertaan modal pemerintah pada Badan Internasional
	- Significant model perinament pada Dadan milantasiana
7243	Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya
72431	Penyertaan Modal Lainnya
724311	Penyertaan Modal Lainnya
	Penyertaan modal pemerintah selain pada BUMN dan Badan Internasional.
724312	Penyertaan Modal Pemerintah SMF
	Penyertaan modal pemerintah pada SMF
70.11	
7244	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
72441	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN  Dengembalian PMD untuk Pedan Usaha Milik Negara (PUMN)
724411	Pengembalian PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Merupakan kontra pos dari PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Mata Anggaran 724111)
	i vici upakan kunna pus uan rivir untuk dauan usana iviilik iveyana (duiviiv) (iviata Angyaran 724111)
7245	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
72451	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
724511	Pengembalian PMP untuk Badan Internasional
	Merupakan kontra pos dari PMP untuk Badan Internasional (Mata Anggaran 724211)
7246	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya
72461	Pengembalian Penyertaan Modal Lainnya
724611	Pengembalian Penyertaan Modal Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Penyertaan Modal Lainnya (Mata Anggaran 724311)
724612	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah SMF
	Merupakan kontra pos dari Penyertaan Modal Pemerintah SMF (Mata Anggaran 724312)

725	RDI/RPD
7251	RDI/RPD
72511	Piutang Pemerintah
72511	Piutang Pemerintah Kepada Daerah
723111	ů i
	Investasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
705110	Piston Pour Palak Konada DUMA
725112	Piutang Pemerintah Kepada BUMN
	Investasi pemerintah pusat pada BUMN.
725113	Piutang Pemerintah Kepada Swasta
	Investasi pemerintah pusat pada Swasta.
7252	Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Penerusan pinjaman LN kepada Daerah (RPD) tahun anggaran berjalan.
725212	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	Penerusan pinjaman LN kepada BUMN (RDI) tahun anggaran berjalan.
72522	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
72522	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu
120221	Penerusan pinjaman LN kepada daerah (RPD) tahun anggaran yang lalu.
	renerusan pinjanian Liv kepaua uaeran (KPD) lahun anggalah yang ialu.
705000	Denominan Dinianan Luar Nanari Kanada DUMNI Tahun Arananan Vara Lahu
725222	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerusan pinjaman LN kepada BUMN (RDI) tahun anggaran yang lalu.
7253	Pengembalian RDI/RPD
72531	Pengembalian Piutang Pemerintah
725311	Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada Daerah
	Merupakan kontra pos dari Piutang Pemerintah Kepada Daerah (Mata Anggaran 725111)
725312	Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada BUMN
723312	Merupakan kontra pos dari Piutang Pemerintah Kepada BUMN (Mata Anggaran 725112)
	ivierupakan kuntra pus uan Flutang Femerintan Kepada bulvin (iviata Anggaran 723112)
725313	Dangambalian Diutang Damarintah Kanada Cwasta
720010	Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada Swasta  Manusakan kantan nag dari Piutang Pemerintah Kanada Swasta (Mata Anggasan 735112)
	Merupakan kontra pos dari Piutang Pemerintah Kepada Swasta (Mata Anggaran 725113)
7054	
7254	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72541	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725411	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan (Mata Anggaran
	725211)
725412	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan (Mata Anggaran
	725212)
72542	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725421	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu  Marupakan kentra pas dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu (Mata Anggaran
	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu (Mata Anggaran
	725221)
725422	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
125422	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu (Mata Anggaran
	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Bolvin Tahun Anggaran Yang Lalu (Mata Anggaran 725222)
726	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
7261	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
72611	Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs
726111	Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
	·

7262	Koreksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
72621	Koreksi Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs
726211	Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
720211	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 726111)
	moreparam nontal pool dann on joodadann on an
8	NON ANGGARAN
81	Penerimaan Non Anggaran
811	Penerimaan Non Anggaran PFK
8111	Penerimaan PFK 10 % Gaji
81111	Penerimaan PFK 10 % Gaji
811111	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji PNS Pusat sebesar 10%
811112	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah
011112	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji PNS Daerah sebesar 10%
	renenimaan yang bersumber dan setorah/potongan pinak ketiga atas Gaji FNS Daerah sebesah 1070
811113	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri
011110	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 10%
	,
811114	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan
	Penerimaan yang bersumber dari potongan pihak ketiga atas Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 10%
8112	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
81121	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
811211	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2%
811212	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
011212	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2%
	Tenerimaan yang bersamber dan setorah potongan pinak kenga atas daji rerasan 1 No Badran sebesar 270
811213	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS Polri
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan Polri dan PNS Polri sebesar 2%
811214	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN sebesar 2%
0440	D. J. DEWD. DIMOG
8113 81131	Penerimaan PFK Beras BULOG Penerimaan PFK Beras BULOG
811311	Penerimaan PFK Belas BULOG  Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
011311	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Pusat untuk PFK Bulog
	Tenerimaan yang bersamber dan setorah potongan atas odji i No i dsat antak i i k balog
811312	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji Polri dan PNS POLRI untuk PFK Bulog
811313	Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji TNI dan PNS Dephan untuk PFK Bulog
0114	Device and DEV 2.07 houses Vesselector Devices
8114 81141	Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
81141	Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesenatan Pemda  Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi
011411	Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Pemda Tk. I/Propinsi sebesar 2%
	Tonomiaan soloran yang persamper dan rarah Asarah Resendian Fernada TK. In Tophisi Sepesal 270
811412	Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
	Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Pemda Tk. II/Kabupaten/Kota sebesar 2%
8115	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
81151	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT  Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT  Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
811511	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT  Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT sebesar 2%
	Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT sebesar 2%
8116	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
81161	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
811611	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan
	Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan sebesar 2%
	- S. S. Maria Solotan Jang 20 Samuel and maria Sarah Resonation February Property No. Depthan Sebesar 270

811612	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI
011012	Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI sebesar 2%
	refletifilitiati setorari yang bersumber dan turan Asuransi Resenatan Fension FOLKIFNS FOLKI sebesai 270
8119	Penerimaan PFK Lain-lain
81191	Penerimaan PFK Lain-lain
811911	Penerimaan Setoran Potongan PFK Lain lain
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan PFK selain setoran/potongan PFK 10 % Gaji, PFK 2 % Gaji Terusan,
	PFK Beras BULOG, PFK 2 % luran Kesehatan Pemda, dan PFK Tabungan Wajib Perumahan.
811912	Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Pusat untuk PFK Tabungan Wajib Perumahan.
044040	D I CI DI DEVITI NUI D I DNCD I
811913	Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Daerah untuk PFK Tabungan Wajib Perumahan.
812	Penerimaan Wesel Pemerintah
8121	Penerimaan Wesel Pemerintah  Penerimaan Wesel Pemerintah
81211	Penerimaan Wesel Pemerintah
812111	Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN
812112	Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP
813	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnyaè KPPN Khusus ?
8131	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
81311	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
813111	Penerimaan setoran sisa UP-PP
	Penerimaan setoran sisa Uang Persediaan yang berasal Pembiayaan Pendahuluan.
813112	Penerimaan Reimbursement / Pengganti PFK PP dan PPHLN
013112	Penerimaan yang berasal dari penggantian PFK Pembiayaan Pendahuluan dan PPHLN
	Ferierinaan yang berasal dan penggantian FFK Feribiayaan Feridandidan dan FFFILN
813113	Penerimaan Penggantian UP PP Berasal dari SPM GU Nihil (Pengesahan)
	Penerimaan dalam rangka pengembalian/penggantian Uang Persediaan yang dipakai sebagai Pembiayaan Pendahuluan.
813114	Penerimaan Talangan dari Rekening Dana SAL
813115	Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
013113	Penggantian Dana Rek. RPPN ke Rek BON atas Pembayaran kepada PPHLN (Rarena adanya pembayaran ileligible)
813116	Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong
813117	Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena frefinancing REKSUS
813118	Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran
	ineligible)
813119	Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong
,	- 335 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
81312	Penerimaan dana talangan dari dana moratorium
813121	Penerimaan dana talangan dari dana moratorium
04.1	
814	Penerimaan Kiriman Uang
8141 81411	Penerimaan Kiriman Uang
81411	Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN
014111	T GIGHHAAH KIIIHAH DANG AHAI KEEN

	Penerimaan TUK dari Rekening 501.000.000 pada KPPN Induk untuk mengisi pagu BO I Gaji/Non Gaji
814112	Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN
014112	Penerimaan Kiriman Uang dari rekening 500.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Kas Negara pada KPPN satu kota dengan KBI
814113	Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas negara pada KPPN satu kota dengan KBI ke Rekening 500.000.000
814114	Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb 500.000.000 ke Rekening BUN
814115	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb 500.000.000
814116	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sub BUN Valas ke Rekening BUN
814117	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501 ke Bank Operasional I
814118	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501 ke Bank Operasional II
81412	Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA
814121	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional I KPPN Non KBI dan sebaliknya
814122	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional II KPPN Non KBI dan sebaliknya
814123	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Sentral Giro/SGG KPPN Non KBI dan sebaliknya
814124	Penerimaan Kiriman Uang dari Bank Operasional III KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
814125	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
814126	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke RPK-BUN-P
814127	Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I di KPPN
814128	Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke Rekening BUN
814129	Penerimaan Kiriman Uang dari BO I di KPPN ke RPK-BUN-P
8142 81421	Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
814211	Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke KPPN (berdasarkan SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti)
814212	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000
814213	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN
814214	Pembetulan Pembukuan Pengeluaran Penggantian dari Rekening Khusus

814215	Penerimaan dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.00 berdasarkan SPM Pengganti
014213	reneninaan dan Kerik ke Kekening DJFD 300.000.00 berdasarkan SFIVI Fengganti
814216	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Khusus
011210	Tenerimaan kiiman eang anar kekening kirasas
8143	Penerimaan Pemindahbukuan
81431	Penerimaan Pemindahbukuan
814311	Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN
814312	Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya
	Penerimaan dari pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu
	Penerimaan dari pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia
814313	Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya
	Penerimaan Pemindahbukuan ini terdiri dari :
	Penerimaan kelebihan pagu pada BO II dimana pagu pada BO II ditetapkan paling banyak sebesar 5% dari pembayaran gaji
	Penerimaan yang berasal dari pemindahbukuan dari BO I gaji untuk pembayaran gaji bulan berkenaan, penerimaan tambahan pagu dari BO I Gaji untuk pembayaran belanja pegawai non gaji induk apabila pagu di BO I Gaji masih ada atau sebelum penihilan BO I Gaji, atau dari BO I Non Gaji apabila pagu di BO I gaji telah nihil
814314	Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional)
014314	Penerimaan pelimpahan dari Rekening Gabungan Bank/Kantor Pos Persepsi ke BO I Non Gaji .
014215	Danie dalah danan dari Darit Turana (On anasi anal Hao Cantral Cira (Cantral Cira Cahunana dan adaliku da
814315	Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya Penerimaan pelimpahan dari rekening Pos Persepsi setiap hari Selasa, Rabu dan Jum'at
	Pemindahbukuan dari BO I Gaji/Non Gaji ke SG/SGG Pengeluaran untuk pembayaran belanja.gaji pegawai dan non gaji
04.404.6	
814316	Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I Penerimaan dari pelimpahan PBB dan BPHTB sebesar % (persentase) bagian pemerintah pusat dan biaya pemungutan
	PBB
814317	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III
	Penerimaan pemindahbukuan PBB dari Bank Persepsi PBB setiap hari Jum'at dengan MAP 411311,411312,
	411313,411314,411315,dan 411319
814318	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO III
0.10.0	Penerimaan pemindahbukuan BPHTB dari Bank Persepsi BPHTB setiap hari Jum'at dengan MAP 411411
01.400	Described Described to the state of the stat
<b>81432</b> 814321	Penerimaan Pemindahbukuan dalam rangka TSA  Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I dan sebaliknya
011021	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
814322	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional II dan sebaliknya
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening BO II sesuai pagu dalam rangka TSA
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO II ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
815	Penerimaan Transito
8151	Penerimaan Transito
<b>81511</b> 815111	Penerimaan Transito Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
010111	т споливан г спустианан овну г стъешван рана кирын

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNSP (Swadana)  Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu  Pengembalian Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu  PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK  Pengembalian Penerimaan Pentihungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji  Pengembalian Penerimaan Pentihungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji  Pengembalian Penerimaan Pentihungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji  Pengembalian Penerimaan Dana Pensan PKS (April)  Pengembalian Penerimaan Inunangan Hari Tua PNS (2,50%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal untuk Tunjangan Hari Tua PNS (PPK) (Persero).  Pengeluan dana seleranpolongan Iran Asarans Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal ke PT. AKKES (Persero).  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana seleranpolongan PKK Gaji Poli dan PNS Poli (8,75%)  Pengeluan dana	815112	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Penelimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu  Pengembalian Penelimaan Penthungan Fihak Keliga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penelimaan Darib Pensiun Pik (A15%) Pengembalian Penelimaan Darib Pensiun Pik (A15%) Pengeliman daria setoranybotongan PFK Gaji PNS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Pik (Pensiun) Pengembalian Penelimaan Tunjangan Hari Tua PNS (2,25%) Pengeliman daria setoranybotongan PFK Gaji PNS sebesar 3,55% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS (Persero).  Pengembalian Penelimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengeliman daria setoranybotongan PFK Gaji PNS sebesar 3,55% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Portagan Hari Tua PNS (Persero).  Pengeliman daria setoranybotongan PFK Gaji PNS sebesar 3,55% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PTL ASKES (Persero).  Pengeliman daria setoranybotongan PFK Gaji PNS sebisar 4,75%) Pengeliman daria setoranybotongan PFK Gaji PNS Polis (A75%) Pengeliman daria setoranybotongan PFK Gaji PNS Polis (A75%) Pengeliman daria setoranybotongan PFK Gaji PNS Polis (A75%) Pengembalian Pencerimaan Dana Penelima Pasata PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Pencerimaan Tunjangan Hari Tua Polis i APNS Polis (25%) Pengembalian Pencerimaan Dana Penelimaan dari Kesehatan Polis i APNS Polis (Persero).  Pengembalian Pencerimaan Dana Penelimaan dari Kesehatan Polis APNS Polis (Persero).  Pengembalian Pencerimaan Dana Penelimaan dari Kesehatan Polis APNS Polis (Persero).  Pengembalian Penelimaan Dana Penelimaan dari Kesehatan Polis APNS Polis (Persero).  Pengembalian Penelimaan Dana Penelimaan dari Kesehatan Polis APNS Polis (Persero).  Pengembalian Penelimaan Dana Penelimaan dari Kesehatan Polis APNS Polis (Persero).  Pengembalian Penelimaan Dana Penelimaan dari Kesehatan Polis APNS Polis (Persero).  Pe		
PENGELUARAN NON ANGGARAN PENGELUARAN NON ANGGARAN PENGELUARAN NON ANGGARAN PK PENGELUARAN NON ANGGARAN PK PENGELUARAN NON ANGGARAN PK PENGELUARAN NON ANGGARAN PK Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Tunjangan PK Gaji PNS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Penslun PNS pada PT. TASPEN (Persero). Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS ke PT. TASPEN (Persero). Penyaluran dana setoran/potongan Irvan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Irvan Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Porsero).  Pengaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit sebesar 4,55% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke DT. ASKES (Porsero).  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit sebesar 4,55% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke DT. ASKES (Porsero).  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (2,55%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (2,65%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit PRS Polit (2,65%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit PRS Polit (2,65%) Penyaluran dana setoran/potongan PRS Polit ke PT. T. ASPER (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PRS Polit ke PT. T. ASPER (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PRS Polit ke PT. T. ASPER (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PRS Polit ke PT. T. ASPER (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PRS Polit ke PT. T. ASPER (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PRS Polit ke PT. T. ASPER (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PRS Polit ke PT. ASPER (Persero).  Penyaluran dana setor	815113	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
PENGELUARAN NON ANGGARAN PEK 2111 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Finak Ketiga (PFK) 10% Gaji 22111 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Finak Ketiga (PFK) 10% Gaji 22111 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Finak Ketiga (PFK) 10% Gaji 22111 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PKS (47,5%) Penyaluran dana setoranyibolongan PK (36) PKS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun PNS pada PT. TASPEN (Persero).  221112 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) Penyaluran dana setoranyibolongan PK (3a) PKS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat unluk Tunjangan Hari Tua PKS ke PT. TASPEN (Persero).  221113 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setoranyibolongan Itara Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PKN sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke PT. ASKES (Persero).  221114 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun Penerimaan dana Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) Polri dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Polri PNS Polri (2%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan Sebesar 4,75% yang sudah dihimpun o	815114	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
PENGELUARAN NON ANGGARAN PEK 2111 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Finak Ketiga (PFK) 10% Gaji 22111 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Finak Ketiga (PFK) 10% Gaji 22111 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Finak Ketiga (PFK) 10% Gaji 22111 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PKS (47,5%) Penyaluran dana setoranyibolongan PK (36) PKS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun PNS pada PT. TASPEN (Persero).  221112 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) Penyaluran dana setoranyibolongan PK (3a) PKS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat unluk Tunjangan Hari Tua PKS ke PT. TASPEN (Persero).  221113 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setoranyibolongan Itara Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PKN sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke PT. ASKES (Persero).  221114 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun Penerimaan dana Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) Polri dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Polri PNS Polri (2%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoranyibolongan PEK (3a) PNG Mana PNS Dephan Sebesar 4,75% yang sudah dihimpun o		
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Para Pensiun PNS (4,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji PNS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat ke Dana Pensiun PNS pada PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerinlah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS ke PT. TASPEN (Persero).  Penyaluran dana setorampotongan Irvan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setorampotongan Irvan Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Pt. ASKES (Persero).  Penyaluran dana setorampotongan Irvan Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polit den PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (4,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan Dana Pensiliharaan dan Kesehatan Polit & PNS Polit (2%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorampotongan PFK Gaji Polit dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorampotongan PSK Gaji Polit dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorampotongan PSK Gaji PNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorampotongan PSK Gaji PNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorampotongan PSK Gaji PNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran da		
Pengembalian Penerimaan Dana Pensun PINS (4,75%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Persiun PNS pada PT. TASPEN (Persero).  Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun PNS pada PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (5,25%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS ke PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penguluran dana setoran/potongan Tersero (5,00) Penguluran dana setoran/potongan Tersero (5,00) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (2,75%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,25%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,25%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,25%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,25%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,25%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (3,55%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (5,56%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (5,66%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (5,66%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (5,66%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit (5,66%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Dephan (3,75%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNI dan PNS Dephan (3,75%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNI dan PNS Dephan (3,75%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNI dan PNS Dephan (3,75%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNI dan PNS Dephan (3,75%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNI dan PNS Dephan (4,75%) Penguluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNI dan PNS Dephan (4,75%) Penguluran d		
Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (A.15%) Penyaluran dana seloran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun PNS pada PT. TASPEN (Persero).  821112 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) Penyaluran dana seloran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS (2,5%) Penyaluran dana seloran/potongan PFK Gaji PNS Sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS (2,5%) Penyaluran dana seloran/potongan Iran Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821114 Pengembalian Penerimaan Dana Persiun Polit & PNS Polit (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit (an PNS Polit sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polit dan PNS Polit (an PNS Polit sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polit dan PNS Polit (an PNS Polit (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit dan PNS Polit sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polit ke PNS Polit (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polit (an PNS Polit sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polit ke PT. T. ASPEN (Persero).  821116 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polit & PNS Polit (2%) Penyaluran dana setoran/potongan PER Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PER Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/poto		
Pensiun PNS pada PT. TASPEÑ (Persero).  821112 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3.25%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS ke PT. TASPEÑ (Persero).  821113 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setorar/potongan luran Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821114 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji Polri dan PNS Polri (3,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji Polri dan PNS Polri (3,25%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji Polri dan PNS Polri (3,25%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji Polri dan PNS Polri (3,25%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji Polri dan PNS Polri (3,25%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji Polri dan PNS Polri (3,25%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji Polri dan PNS Polri (3,25%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri ab PNS Polri (3,25%) Penyaluran dana setorar/potongan Dana Pemeliharana dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821117 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PRF Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setorar/potongan PRF Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana Setorar/potongan PRF Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyal		
Penyeluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS ke PT. TASPEN (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan luran Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setoran/potongan luran Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Seketan PNS Daran PNS Daran Sebesar 2% yang sudah dih		
E21113 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Penyaluran dana setoran/potongan luran Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821114 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri apa PT. TASPEN (Persero).  821115 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri apa PS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821117 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  821118 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dra Pensiun Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  821119 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan (2,5%) Penyaluran dana setoran/potongan Brit Kaji Plank Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan dana Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821212 Pen	821112	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%)
Penyaluran dana setoran/potongan Iuran Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal ke PT. ASKES (Persero).  821114 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Potri & PNS Potri (4,75%) Penyaluran dan setoran/potongan PFK Gaji Potri dan PNS Potri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal ke Dana Pensiun Potri dan PNS Potri pada PT. TASPEN (Persero).  821115 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Potri & PNS Potri (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Potri dan PNS Potri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal untuk Tunjangan Hari Tua Potri dan PNS Potri ke PT. TASPEN (Persero).  821116 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Potri & PNS Potri (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Potri & PNS Potri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal ke PT. ASKES (Persero).  821117 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal ke Dana Pensiun Potri dan PNS Potri pada PT. TASPEN (Persero).  821118 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal tuntuk Tunjangan Hari Tua Potri dan PNS Potri ke PT. TASPEN (Persero).  821119 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal ke PT. ASKES (Persero).  82121 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan PNS Pusal sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusal ke PT ASKES (Persero).  821219 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaj		Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS ke PT. TASPEN (Persero).
pusat ke PT. ASKES (Persero).  821114 Pengembailan Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  821115 Pengembailan Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  821116 Pengembailan Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)  Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821117 Pengembailan Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  821118 Pengembailan Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  821119 Pengembailan Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)  Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821119 Pengembailan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821212 Pengembailan Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	821113	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%)
Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  821115 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  821116 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821117 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  821119 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  8212 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  82121 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Pen		
pusát ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  821115 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3.25%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 3.25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  821116 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)  Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821117 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%)  821118 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (2,5%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (2,5%)  821119 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)  Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  8212 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Briak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Dearah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821212 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehata	821114	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%)
Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (2,5%)  Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Baerah (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Baerah (2%)		Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).
Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (4,75%) yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%)  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (2,5%)  Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Baerah (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Baerah (2%)	821115	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%)
Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Poliri & PNS Poliri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  821117 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  821118 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  821119 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  8212 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan 82121 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan 82121 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821212 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).		
oleh pemerintah pusat ke PT. AŠKES (Persero).  821117 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  821118 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  821119 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  8212 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  82121 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821212 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821213 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	821116	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)
Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Dolri & PNS Polri (2%)		Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).
pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).  Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan (3,25%) Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	821117	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)
Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).		
Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).  Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	821118	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%)
Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).		Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).
Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)  Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	821119	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)
Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).		Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah
Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	8212	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821212 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821213 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	82121	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).  821213 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	821211	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh
Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).	821212	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh
821214 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)	821213	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun
	821214	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)

	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan TNI & PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
8213	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
82131	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
821311	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
	Penyaluran penyetoran setoran/potongan PFK Beras PNS Pusat ke PT. BULOG
821312	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
021012	Penyaluran penyetoran setoran/potongan PFK Beras Polri & PNS Polri ke PT. BULOG
821313	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
	Penyaluran penyetoran setoran/potongan PFK Beras TNI & PNS Dephan ke PT. BULOG
8214	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
82141	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % luran Kesehatan Pemda
821411	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan PNS Pemda Tk.I/Propinsi ke PT ASKES (Persero).
821412	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan PNS Pemda Tk.II/Kabupaten/Kota ke PT
	ASKES (Persero).
8215	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
82151	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT  Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
821511	Pengembalian Penerimaan FFK 2 % Asuransi Bidan/bokter FTT  Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
021311	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT ke PT ASKES (Persero).
	r engeluaran penyetoran setoran potongan i i ik 270 turan Asuransi kesenatan buan bukter i i i ke i i ASKES (i ersero).
8216	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
82161	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
821611	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan ke PT ASKES (Persero).
821612	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% uran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI ke PT ASKES (Persero).
8219	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
82191	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
821911	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK selain setoran/potongan PFK 10 % Gaji, PFK 2 % Gaji Terusan,
	PFK Beras BULOG, PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda, dan PFK Tabungan Wajib Perumahan kepada pihak-pihak terkait.
001010	December 1 and December 2 DEW Tales and December 2 DIC December 2
821912	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat ke BAPETARUM.
821913	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah ke BAPETARUM.
822	Pelunasan Wesel Pemerintah
822 8221	Pelunasan Wesel Pemerintah  Pelunasan Wesel Pemerintah
8221	Pelunasan Wesel Pemerintah  Pelunasan Wesel Pemerintah
82211	Pelunasan Wesel Pemerintah  Pelunasan Wesel Pemerintah
UZZIII	Pengeluaran untuk pembayaran wesel pemerintah
0.5.5	
823	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya è KPPN Khusus
8231	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
82311	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
823111	Pembayaran UP-PP (DU/TU)
823112	Pembayaran PFK PP (Prefinancing)

823113	Pembayaran SPM-GU Nihil (Pengesahan ke Rekening BUN)
823114	Pengembalian Talangan Dana SAL
823115	Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible
823116	Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong
823117	Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
823118	Pengisian Rekening Dana SAL
823119	Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong
82312	Pengembalian dana talangan ke dana moratorium
823121	Pengembalian dana talangan ke dana moratorium
824	Pengeluaran Kiriman Uang
8241	Pengeluaran Kiriman Uang
82411	Pengeluaran Kiriman Uang
824111	Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN
	Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN terjadi karena penihilan pagu BO I Gaji dan pengiriman kelebihan pagu dari BO I
	Non Gaji ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
004440	
824112	Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Kas negara pada KPPN satu kota dengan KBI ke Rekening 500.000.000
004440	
824113	Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari rekening 500.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Kas Negara pada KPPN satu kota dengan KBI
	Satu kota ucingan kot
824114	Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke Rekening BUN
024114	Tengeluaran Kinman dang dan Kantor Lusat Dar bike Kekening bow
824115	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb
-2.110	
824116	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Rekening Sub BUN Valas
824117	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional I ke Rekening 501
824118	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional II ke Rekening 501
82412	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA
824121	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional I KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk dan sebaliknya
824122	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional II KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk dan sebaliknya
004400	Describerant Visionan Haust desi Cartest Cha (COC VIDDA New VIDE D. L. Fort COC CCC VIDDA L. L
824123	Pengeluaran Kiriman Uang dari Sentral Giro/SGG KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk dan sebaliknya

824124	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional III KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
824125	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
024123	rengeluaran Kiliman dang dan Kekening dabungan Kiri Non Korke Kekening 301.000.000 Kiri Ninduk
824126	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke RPK-BUN-P
824127	Pengeluaran Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I KPPN
824128	Pengeluaran Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke Rekening BUN
021120	- Singoladian ramman Gang alan ra re 2011 no ramang 2011
824129	Pengeluaran Kiriman Uang dari BO I KPPN ke RPK-BUN-P
8242	Pangaluaran Kiriman Hang Dalam Pangka Pakeus
8242 82421	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
824211	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN
824212	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000
824213	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN
024213	rengendaran Kininan dang dan Kekening Khusus ke Kekening Don
824214	Pembetulan Pembukuan Penerimaan Penggantian dari Rekening Khusus
004015	Developed de MDDN le Delecte DIDLEGO 000 000 hadradas CDM Developed
824215	Pengeluaran dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.000 berdasarkan SPM Pengganti
824216	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Khusus
8243	Pengeluaran Pemindahbukuan
82431	Pengeluaran Pemindahbukuan
824311	Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN
824312	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya
	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke BO untuk pembayaran
	belanja gaji dan non gaji
	Pengeluaran Pemindahbukuan kelebihan saldo pada rekening non gaji atau sisa pagu pada rekening Gaji BO II ke
	Rekening Kas Negara No. 501.000.000 pada Bank Indonesia
824313	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya
52.10.10	Pengeluaran untuk pemindahbukuan dari BO II ke BO I terdiri dari :
	Pembagian pagu belanja pegawai dari BO I sebesar pembayaran gaji ditambah 5% dari pembayaran gaji ke masing-masing
	BO II, penambahan pagu BO II untuk kekurangan pembayaran belanja pegawai di luar gaji induk
	Pengeluaran untuk pemindahbukuan dari BO II ke BO I meliputi pengeluaran pemindahbukuan kelebihan pagu BO II ke BO
	I Gaji sebelum penihilan BO I Gaji atau ke BO I Non Gaji setelah penihilan BO I Gaji
824314	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional)
02 10 17	Pengeluaran dalam rangka pelimpahan dari Rekening Gabungan Bank/Kantor Pos Persepsi ke BO I Non Gaji. Rekening
	Kas Negara Gabungan adalah satu rekening untuk menampung pelimpahan penerimaan dari Rekening Kas Negara
	Persepsi
824315	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya
024313	Penigeluarah Penindahbukuan dari Bo I Gaji/Non Gaji ke SG/SGG Pengeluaran untuk pembayaran belanja gaji pegawai dan non gaji
	1. Shimaansakaan aan 50 i Sajirton Saji ko Sorsoo i Shgolaaran anlak pombayaran belanja.gaji pegawar aan hon gaji

	Pemindahbukuan dalam rangka pelimpahan penerimaan negara dari rekening Pos Persepsi ke BO I
824316	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I
	Pelimpahan PBB dan BPHTB sebesar % (persentase) bagian pemerintah pusat dan biaya pemungutan PBB
824317	Pegeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III
	Pengeluaran pemindahbukuan PBB dari Bank Persepsi PBB setiap hari Jum'at dengan MAP 411311,411312, 411313,411314,411315,411319
824318	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO III
	Pengeluaran pemindahbukuan BPHTB dari Bank Persepsi BPHTB setiap hari Jum'at dengan MAP 411411
82432	Pengeluaran Pemindahbukuan dalam rangka TSA
824321	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I dan sebaliknya
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Pengeluaran pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
824322	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional II dan sebaliknya
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening BO II sesuai pagu dalam rangka TSA
	Pengeluaran pemindahbukuan dari BO II ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
825	Pengeluaran Transito
8251	Pengeluaran Transito
82511	Pengeluaran Transito
825111	Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah
825112	Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
320112	r ongoldarari oang r otoedidan bana r injaman/mban Edal Negeli
825113	Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)